



LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berisikan tentang capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan transparansi serta pertanggungjawaban dan wujud pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kinerja organisasi diukur atas dasar pencapaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024.

Kami menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta 20 Februari 2025

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

PERNYATAAN TELAH DI REVIU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2025

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wahjudi Poerwanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Sumberdaya Manusia.....	5
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024	11
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	24
3.2. Efisiensi.....	69
3.3. Kinerja Anggaran.....	69
BAB IV. PENUTUP.....	72

DAFTAR TABEL

1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2023.....	11
2. Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2024.....	23
3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2024.....	25
4. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2024.....	26
15. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2024 ...	26
6. Capaian Tenaga Kerja Terlibat Bidang Perikanan Budidaya.....	31
7. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2020-2024	34
8. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2024 ** (1000 ekor)	43
9. Realisasi IP ASN KKP Tahun 2024 berdasarkan Unit Organisasi Eselon I	47
10. Tabel Capaian NKPA Unit Eselon I Lingkup KKP	63
11. Nilai Efisiensi Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	69
12. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan IV Tahun 2020 - 2024 ...	70
13. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2024.....	70
14. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Satuan Kerja V Tahun 2023 dan 2024.....	70

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya.....	4
2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja.....	5
3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan.....	6
4. Perjanjian Kinerja awal Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024.....	17
5. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024	21
6. Capaian Kinerja Tahun 2024	22
7. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2024	25
8. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2024	27
9. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama	29
10. Produksi udang 2020-2024	35
11. Produksi Kerapu 2020-2024	36
12. Produksi Kakap 2020-2024	36
13. Produksi Bandeng 2020-2024.....	37
14. Produksi Patin 2020-2024.....	37
15. Produksi Nila 2020-2024	38
16. Produksi Ikan Mas 2020-2024	39
17. Produksi Lele 2020-2024	39
18. Produksi Gurame 2020-2024.....	40
19. Produksi Rumput Laut 2020-2024	40
20. Grafik capaian Nilai PM SAKIP Lingkup KKP Tahun 2024	53
21. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Maturitas SPIP lingkup KKP.....	54
22. Perbandingan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023	55
23. Perbandingan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023	56
24. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024	61
25. Grafik Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Eselon I KKP	65
26. Perbandingan Tingkat Kepatuhan peneglolaan BMN Lingkup KKP.....	67
27. Perbandingan capaian tingkat Kepatuhan Data Eselon I KKP	68
29. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2024.....	71

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres 18 Tahun 2020 dan Renstra Ditjen Perikanan Budi daya Tahun 2020- 2024. Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum perbaikan di tahun berikutnya.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 terdiri dari 6 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor. 58/DJPB/2024 tentang penetapan IKU Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024.

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya. Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan adanya perubahan Indikator kinerja NKA ke NKPA. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan cara perhitungan.

Capaian kinerja tahun 2024 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100,14%. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang menyelenggarakan pembangunan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan perikanan budi daya yang berkelanjutan.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 24 IKU terdapat 4 Iku yang tidak mencapai target yaitu : IKU (i) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang mencapai 97,22% ; (ii) Produksi perikanan budidaya mencapai 69,13% dari target; (iii) Produksi Ikan Hlas Mencapai 82,82% dan (iii) Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya yang mencapai 98,66% dari target .

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perikanan Budi Daya yang bertanggung jawab dan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi “obat mujarab atau *panacea*” bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial dalam pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi usaha pembudidayaan ikan sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat, lapangan pekerjaan dan usaha serta investasi. Usaha pembudidayaan ikan sangat beragam, meliputi skala usaha (industri/pengusaha hingga skala rumah tangga dan mikro), teknologi yang diaplikasikan, segmentasi usaha serta komoditas dan wadah Budi Daya. Produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pasar ekspor. Sehingga berkontribusi pada sosial-ekonomi masyarakat, perekonomian daerah dan nasional dari penerimaan pajak dan devisa. Usaha pembudidayaan ikan sejalan dengan ekonomi kerakyatan, karena skala usaha dan teknologi dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikan. Penelitian yang ada komoditas perikanan Budi Daya berupa rumput laut juga berfungsi sebagai penyerap dan simpanan karbon sehingga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta kesehatan lingkungan karena menghasilkan oksigen.

Sumberdaya lahan perikanan Budi Daya yang ada dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, sudah seharusnya dapat dijadikan modal dasar pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu perlu perumusan strategi yang jitu, yang berpijak pada penelaahan mendalam mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) terhadap setiap aspek yang mempengaruhi usaha perikanan Budi Daya, untuk terus dibangun dan dikembangkan, utamanya guna membangun daya saing dalam menghadapi era pasar global dan industrialisasi, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, pengembangan perikanan Budi Daya ke depan harus mampu mendayagunakan besarnya potensi sumberdaya lahan Budi Daya untuk dapat mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara dari aktivitas ekspor hasil perikanan Budi Daya, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Memperhatikan potensi, keragaan kondisi saat ini dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan Budi Daya, maka sangat beralasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 1 dari 5 program terobosan yang terkait dengan perikanan Budi Daya. Program terobosan KKP terkait perikanan Budi Daya tersebut adalah pengembangan perikanan Budi Daya di laut, pesisir dan darat (air tawar) yang berkelanjutan. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan (1) pengembangan perikanan Budi Daya yang berorientasi ekspor dan (2)

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan Budi Daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam enam perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan Budi Daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

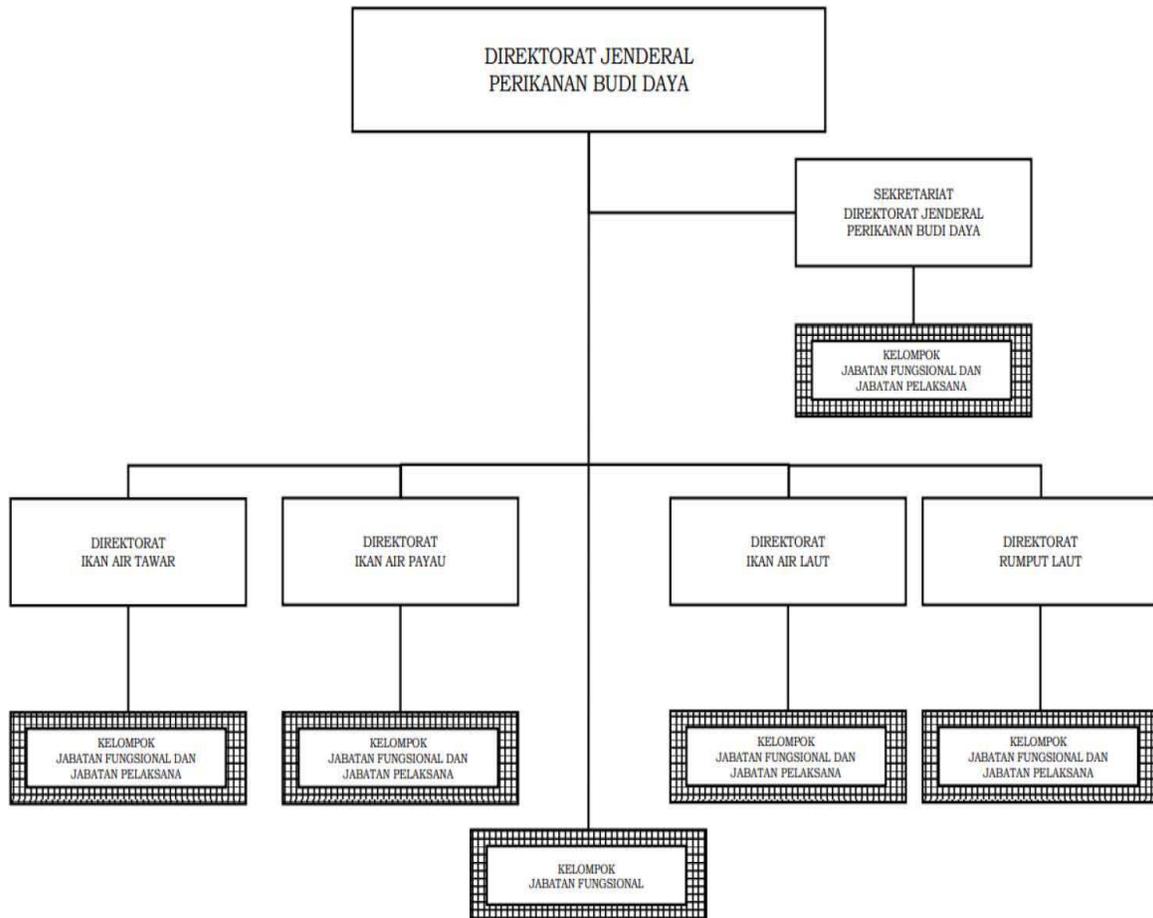
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya selama Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya,

serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; vi) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya

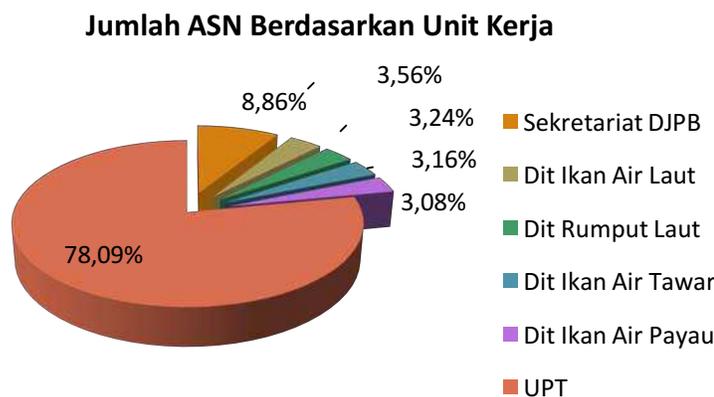
Selain itu Ditjen Perikanan Budi Daya juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu

6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

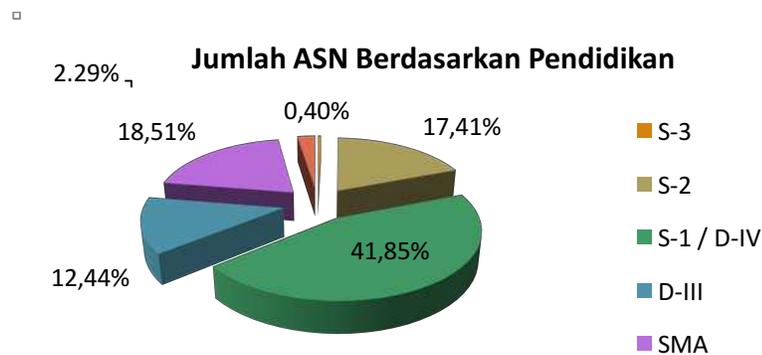
1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Tahun 2024 adalah 1.278 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 112 orang (8,86%); (ii) Direktorat Ikan Air Laut sejumlah 45 orang (3,56%); (iii) Direktorat Rumput Laut sejumlah 41 orang (3,24%); (iv) Direktorat Ikan Air Tawar sejumlah 40 orang (3,16%) (v) Direktorat Ikan Air Payau sejumlah 39 orang (3,08%); dan (vi) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 987 Orang (78,09%).



Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S-3 sejumlah 5 orang (0,40%); (ii) S-2 sejumlah 220 orang (17,41%); (iii) S-1/D-IV sejumlah 559 orang (41,85%); (iv) D-III sejumlah 156 orang (12,44%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 325 orang (18,51%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 29 orang (2,29%).



Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan Budi Daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi Budi Daya air tawar 2,83 juta ha, Budi Daya air payau 2,96 juta ha dan Budi Daya laut 12,12 juta ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,26 persen untuk Budi Daya air tawar, 22,48 persen pada Budi Daya air payau dan 1,39 persen untuk Budi Daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk Budi Daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan Budi Daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan Budi Daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan Budi Daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan Budi Daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) implementasi cara berBudi Daya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan Budi Daya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan Budi Daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan Budi Daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan Budi Daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan Budi Daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DJPB Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama kurun waktu 2024.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja selama Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan Budi Daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan Budi Daya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan Budi Daya secara berkelanjutan.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan Budi Daya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
 - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
 - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /startegis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.

5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan Budi Daya yang partisipatif”, dengan indikator pengujian residu produk perikanan Budi Daya yang partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :
 - a. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
 - b. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
 - c. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
 - d. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 34 di tahun 2020 dan 36 pada tahun 2024
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
 - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024
 - d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 – 2024
 - e. Nilai PM SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
 - f. Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 – 2024
 - g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024
 - h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar 82 persen pada tahun 2020 dan 90 persen pada tahun 2024
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
 - j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya 88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
 - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2023 terdapat beberapa perbedaan target dengan target yang tercantum pada Renstra DJPB 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan KKP dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB 2021. Adapun Target Indikator yang berbeda itu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2023

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-2	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya	3.600.000	4.800.000	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
	Tingkat Kemandirian pulau pulau kecil terluar	4	0	Mulai Tahun 2022 sesuai dengan arahan dari pimpinan (MKP) untuk kegiatan kemandirian SKPT tidak di laksanakan lagi di DJPB
Ik-3	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya (Rp. Miliar)	23,77	49,9	Penetapan target PNBPN Tahun 2024 didasarkan pada lembar rekomendasi hasil penelaahan PNBPN KKP Tahun 2024
Ik-4	Tenaga Kerja yang terlibat	-	26.865	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
1k-5	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan	-	15	IKU baru tahun 2023 dikarenakan adanya Taging kegiatan prioritas nasional.
Ik.7	Poduksi Perikanan Budi Daya (juta ton)		24,85	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-8	Produksi Ikan Hias (Milyar ekor)		1,73	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-8	Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor (paket) Berubah menjadi Prosentase jumlah sampel residu yang memen	17.885	-	Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi saking oleh Menpan tahun 2021 yang menyampaikan bahwa IKU pengejian residu dianggap bukan outcome tapi masih proses
IK-9	Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sample bebas residu) (%)	-	97	
IK.11	Indeks Profesionalitas ASN DJPB (%)	75	85	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	14	Capaian Tahun 2023 Unit Kerja yang menerapkan wilayah bebas dari korupsi sudah mencapai 13,
IK- 13	Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DJPB dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022	≤1	≤5	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-14	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86,50	80,50	adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021
Ik-17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya	86	94	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-18	Unit kerja yang menerapkan Inovasi pelayanan publik	1	-	Penyesuaian Nama IKU sebagaimana

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	-	76	nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP
IK 19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya(%)	77,5	77,5	Kesepakatan eselon 1 pada saat rapat kinerja KKP IKU ini yang awalnya masuk ke sasaran program Terkelolanya perikanan Budi Daya berkelanjutan menjadi ke Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
IK.22	Indikator Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	-	77,5	penambahan IKU baru berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITj.0/R.C.610/I/2021 tanggal 11 Januari Tahun 2021
IK.23	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN.	-	77,5	
IK.24	Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data	-	90	IKU baru sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (nilai)	105
		2.	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000
2.	Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat	3.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya (Rp. Miliar)	49,98
		4.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)	23.784
		5.	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)	15
3.	Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan	6.	Percontohan pengelolaan kluster kawasan budi daya berkelanjutan (kluster)	50
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	7.	Produksi perikanan budi daya (Juta ton)	24,85
		8.	Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,73
5.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	9.	Persentase sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	10.	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	85
		11.	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)	14
		12.	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi	≤0,5

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		anggaran Direktorat jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 (%)	
		13. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	82
		14. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Budi Daya (level)	3,3
		15. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80
		16. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	76
		18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
		20. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
		23.	Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)	91

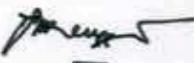
Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	766.387.993.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	157.005.747.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	383.541.059.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	185.817.246.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	40.023.941.000
2.	Program Dukungan Manajemen	333.778.042.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024		1.100.166.035.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Sakti Wahyu Trenggono


Tb. Haeru Rahayu

Gambar 4. Perjanjian Kinerja awal Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

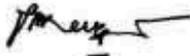
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (nilai)	105
		2.	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000
2.	Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat	3.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya (Rp. Miliar)	49,98
		4.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)	23.784
		5.	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)	15
3.	Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan	6.	Percontohan pengelolaan klaster kawasan budi daya berkelanjutan (klaster)	50
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	7.	Produksi perikanan budi daya (Juta ton)	24,85
		8.	Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,73
5.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	9.	Persentase sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	10.	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	85
		11.	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)	14
		12.	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi	≤0,5

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		anggaran Direktorat jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 (%)	
		13. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	82
		14. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Budi Daya (level)	3,3
		15. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80
		16. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	76
		18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
		20. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	81

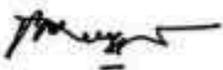
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
		23.	Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)	91

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	833.619.200.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	131.656.148.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	466.957.851.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	203.049.468.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	31.955.733.000
2.	Program Dukungan Manajemen	393.176.207.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024		1.226.795.407.000

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budi Daya

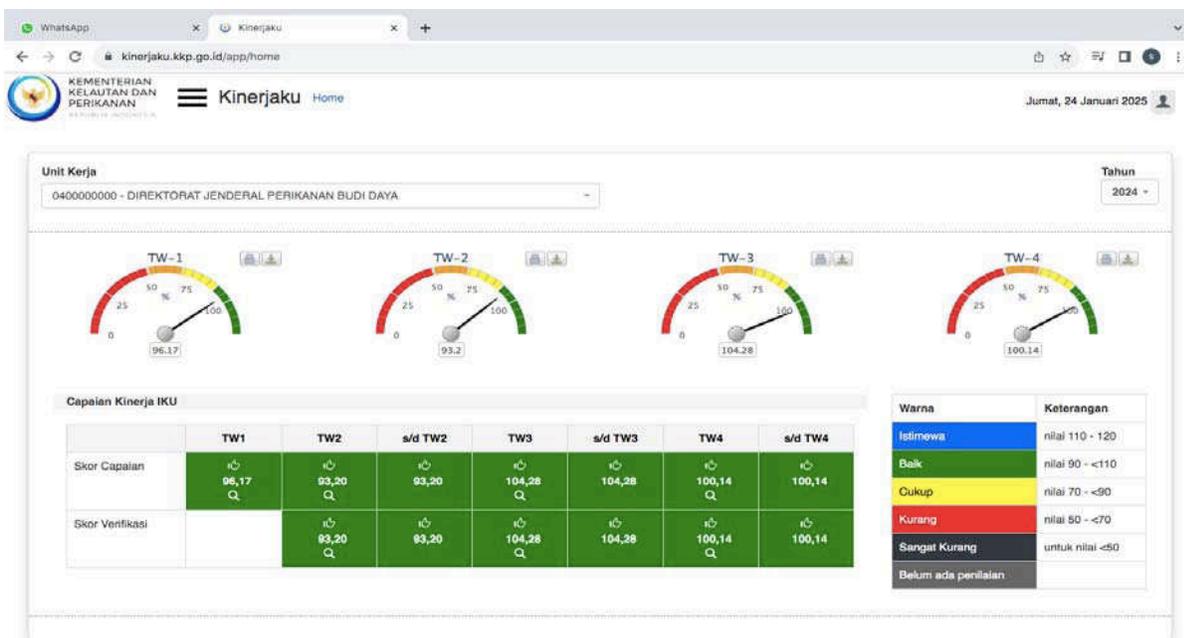

Tb. Haeru Rahayu

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024



Gambar 6. Capaian Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan Budi Daya pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Capaian Kinerja Ditjen perikanan Budidaya Tahun 2024 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 100,14 %. Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2024 tergambar pada Dashboard aplikasi Kinerjaku di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2024

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	% Aplikasi Kinerja
SS.1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya				
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,00	102,08	97,22	97,22
2	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000	5.130.000	106,88	106,88
SS.2	Ekonomo Sektora Perikanan Budi Daya Meningkat				
3	Nilai PNBp dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	49,98	117,01	234,10	120
4	Tenaga kerja terlibat	23.784	32.509	138,28	120
5	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan	15	15	100	100
SS.3	Kawasan Perikanan Budi Daya Yang berkelanjutan				
6	Percontohan Pengelolaan cluster kawasan budidaya berkelanjutan	50	50	100	100
SS.4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya				
7	produksi Perikanan Budidaya (juta ton)	24,85	17,18	69,13	69,13
8	produksi ikan hias (miliar ekor)	1,73	1,45	83,82	83,82
SS.5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya				
9	Prosentase jumlah sampe residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97	100	103,09	103,09
SS.6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
10	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	85	86,80	102,12	102,12
11	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	14	15	107,14	107,14
12	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 (%)	≤0,5	0,06	190	120
13	Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	82	84,04	102,49	102,49
14	Tingkat Maturitas SPIP (Level)	3,3	3,57	108,18	108,18

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	% Aplikasi Kinerja
15	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	80	93,94	117,43	117,43
16	Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	141,84	120
17	Nilai Hasil proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	76	76,07	100,09	100,09
18	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/startegis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	80	82,56	103,20	103,20
19	Nilai IKPA DJPB	93,76	92,50	98,66	98,66
20	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran DJPB	81	86,99	107,40	107,40
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa	80	82,24	102,80	102,80
22	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN	80	87,50	109,38	109,38
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data	91	100	109,89	109,89

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

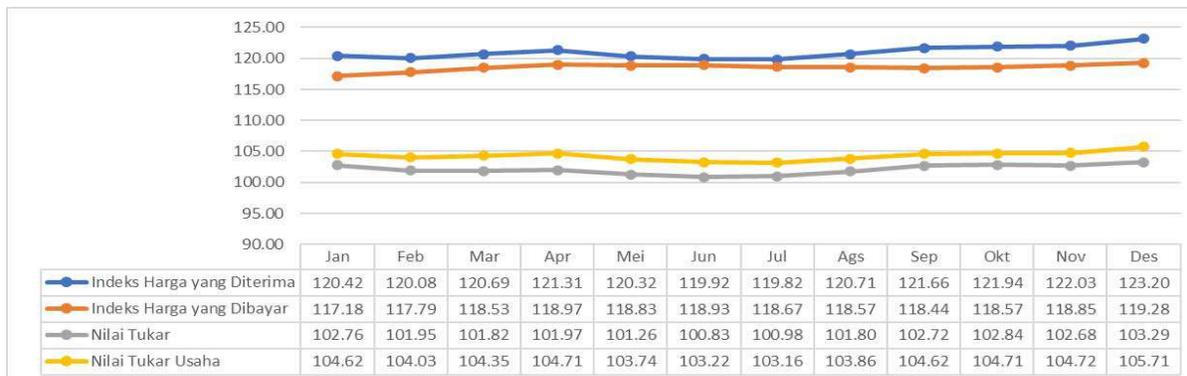
SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya

IKU.1 Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPi)

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
100,55	102,83	104,62	104,83	105	102,08	97,22	0,40

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya usaha budidayanya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan angka indek antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Jika dilihat perkembangan selama kurun waktu 2020 – 2024 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) secara umum mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen per tahun sedangkan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen per tahun. Naiknya nilai tukar ini disebabkan naiknya indeks diterima oleh pembudidaya ikan setiap tahunnya yang lebih besar dibandingkan dengan indeks dibayar oleh pembudidaya. Namun bila dilihat pada tahun 2024 NTPI dan NTUPI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi



Gambar 7. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2024

Pada bulan Januari - Desember tahun 2024 secara rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar 102,08. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2024 berada di atas 100. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Tukar Pembudidaya Ikan fluktuatif selama tahun 2024 dikisaran angka 101 – 103 dan NTPI berada pada nilai terendahnya pada bulan Juni sebesar 100,98 dan di akhir tahun mengalami kenaikan hingga pada puncaknya di bulan Desember sebesar 103,29.

Tabel 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2024

Komponen NTPI	Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
Nilai Tukar	102.76	101.95	101.82	101.97	101.26	100.83	100.98	101.80	102.72	102.84	102.68	103.29	102.08	0.05
Nilai Tukar Usaha	104.62	104.03	104.35	104.71	103.74	103.22	103.16	103.86	104.62	104.71	104.72	105.71	104.29	0.10
a Indeks Harga Diterima (It)	120.42	120.08	120.69	121.31	120.32	119.92	119.82	120.71	121.66	121.94	122.03	123.20	121.01	0.21
- Budidaya air tawar	115.08	115.14	116.40	117.55	116.88	116.20	116.52	116.42	116.73	116.40	116.31	117.64	116.44	0.20
-Budidaya laut	115.76	116.71	117.35	117.16	117.31	115.55	115.40	115.58	115.10	115.23	116.50	116.97	116.22	0.10
- Budidaya Air Payau	121.54	120.87	120.97	121.43	120.12	120.60	120.54	121.72	122.94	123.40	123.34	124.39	121.82	0.21
b Indeks harga Dibayar	117.18	117.79	118.53	118.97	118.83	118.93	118.67	118.57	118.44	118.57	118.85	119.28	118.55	0.16
- Indeks KRT	119.44	120.41	121.77	122.45	122.03	122.00	121.46	121.19	120.85	120.93	121.46	122.36	121.36	0.22
-Indeks BPPBM	115.11	115.44	115.66	115.86	115.99	116.18	116.16	116.23	116.29	116.45	116.53	116.55	116.04	0.11

Jika dilihat dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa selama tahun 2024 indeks harga diterima mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,21 persen dengan rata-rata indeks harga diterima (It)

sebesar 121,01. Dari komponen penyusun It, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indeks harga ikan seluruhnya mengalami kenaikan harga dengan kenaikan harga tertinggi pada budidaya ikan air payau sebesar 0,21 persen sementara budidaya air tawar dan budidaya laut masing-masing sebesar 0,20 persen dan 0,10 persen. Meningkatnya indeks harga ikan dimungkinkan semakin membaiknya tingkat permintaan ikan terutama di akhir tahun 2024.

Komponen penyusun Ib yang terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), masing-masing indeks rata-rata selama tahun 2024 sebesar 121,36 dan 116,04 dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,22 persen per bulan dan 0,11 persen per bulan. Naiknya indeks harga dibayarkan oleh pembudidaya ini diakibatkan oleh adanya kenaikan harga bahan pokok dan naiknya biaya produksi.

Tabel 4. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2024

Komponen NTPi	Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
1. Konsumsi Rumah Tangga	119.44	120.41	121.77	122.45	122.03	122.00	121.46	121.19	120.85	120.93	121.46	122.36	121.36	0.22
2. Makanan, Minuman Dan Tembakau	123.42	125.06	127.30	128.17	127.29	127.09	125.94	125.23	124.59	124.78	125.62	127.17	125.97	0.28
3. Pakaian Dan Alas Kaki	120.19	120.42	121.25	122.58	122.61	122.88	123.26	123.41	123.57	123.68	123.82	123.96	122.64	0.28
4. Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	108.54	108.58	108.68	109.01	109.03	109.12	109.20	109.26	109.45	109.53	109.59	109.68	109.14	0.09
5. Peralengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	116.74	116.96	117.21	117.48	117.61	117.84	118.00	118.17	118.40	118.60	118.78	118.92	117.89	0.17
6. Kesehatan	115.23	115.49	115.70	115.99	116.11	116.26	116.41	116.52	116.65	116.92	117.05	117.12	116.29	0.15
7. Transportasi	119.01	119.24	119.36	119.60	119.69	119.83	119.93	120.57	120.15	119.45	119.53	119.63	119.67	0.05
8. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	104.53	104.53	104.53	104.53	104.57	104.57	104.57	104.61	104.64	104.65	104.67	104.64	104.59	0.01
9. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	114.83	114.98	115.17	115.39	115.51	115.80	116.61	116.77	116.93	117.00	117.08	117.16	116.10	0.18
10. Pendidikan	104.61	104.68	104.68	104.68	104.68	104.69	105.30	105.62	105.79	105.80	105.81	105.82	105.18	0.10
11. Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	113.82	114.08	114.35	114.90	115.18	115.35	115.58	115.68	115.96	116.06	116.27	116.41	115.30	0.20
12. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	120.11	120.37	120.89	121.82	122.46	122.80	123.27	123.62	123.92	124.64	125.28	125.49	122.89	0.40

Selama periode Januari - Desember tahun 2024, indeks konsumsi rumah tangga tertinggi secara rata-rata adalah Makanan, Minuman dan Tembakau (125,97), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (122,89), serta Pakaian dan Alas Kaki (122,64). Naiknya komponen tersebut dikarenakan naiknya harga pada komponen-komponen tersebut. Jika dilihat dari kenaikan rata-rata per bulannya maka kenaikan rata-rata indeks perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tertinggi yakni sebesar (0,40%).

Tabel 5. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2024

Komponen NTPi	Indeks Harga												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
1. BPPBM	115.11	115.44	115.66	115.86	115.99	116.18	116.16	116.23	116.29	116.45	116.53	116.55	116.04	0.11
2. Bibit/Benhil	115.06	115.47	115.82	115.95	116.05	115.94	115.97	115.86	115.81	115.74	116.03	116.11	115.82	0.08
3. Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	117.80	118.14	118.35	118.54	118.65	118.90	118.87	118.99	119.11	119.39	119.41	119.43	118.80	0.13
4. Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	104.81	104.92	104.98	105.17	105.21	105.28	105.28	105.32	105.37	105.38	105.42	105.54	105.22	0.06
5. Transportasi Dan Komunikasi	121.43	121.47	121.51	121.68	121.62	122.01	122.10	122.56	122.15	121.54	121.59	121.65	121.78	0.02
6. Barang Modal	107.81	107.96	108.04	108.20	108.28	108.31	108.35	108.38	108.40	108.42	108.41	108.42	108.25	0.05
7. Upah Buruh	112.96	113.33	113.52	113.86	113.98	114.17	114.27	114.62	114.62	114.79	114.80	114.83	114.15	0.15

Berdasarkan komponennya selama periode Januari – Desember, Indeks BPPBM dengan kenaikan rata-rata tertinggi berturut-turut adalah upah buruh, pupuk, obat-obatan dan pakan ikan, serta bibit/benih dan dengan kenaikan rata-rata per bulan masing-masing sebesar 0,15 persen, 0,13 persen dan 0,08 persen. Kenaikan indeks harga upah buruh disebabkan naiknya upah minimum regional, Naiknya indeks Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan selain disebabkan kenaikan inflasi, juga dimungkinkan karena masih tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mempegaruhi harga tepung ikan dan secara langsung mempengaruhi harga pakan ikan, sementara bibit/benih mengalami kenaikan dimungkinkan karena naiknya harga bibit/benih ikan.

Berdasarkan wilayahnya selama periode Januari – Desember tahun 2024 terdapat 19 provinsi yang rata-rata indeks NTPI-nya di atas 100, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua. NTPI rata-rata tertinggi pada Januari - Desember tahun 2024 ini adalah provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 111,84 dan NTPI terendah provinsi DI Yogyakarta sebesar 87,56.



Gambar 8. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2024

Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPI adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Oleh karenanya kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi, baik benih maupun ikan konsumsi juga mesti diperhatikan.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) merupakan nilai indeks yang didapat dari indeks yang diterima pembudidaya dan indeks harga yang dibayarkan pembudidaya, dimana indeks harga yang dibayar terdiri dari indeks harga konsumsi rumah tangga yang tidak bisa diintervensi oleh

Ditjen Perikanan Budi Daya dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang bisa diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budi Daya dengan memberikan program bantuan kepada pembudidaya ikan diantaranya bantuan benih/bibit, calon induk, bantuan mesin pakan, bantuan excavator, bioflok, kebun bibit rumput laut, pupuk, kincir dan sosialisai kebijakan dan bimbingan teknis. Pada tahun 2024 indeks konsumsi rumah tangga sangat berperan dalam penurunan nilai tukar pembudidaya ikan seperti dengan naiknya harga konsumsi barang pokok sehingga nilai tukar pembudidaya ikan menjadi tidak tercapai dimana pada tahun 2020-2023 nilai tukar pembudidaya ikan selalu tercapai

IKU.2 . Rata-rata Pendapatan Pembudidaya

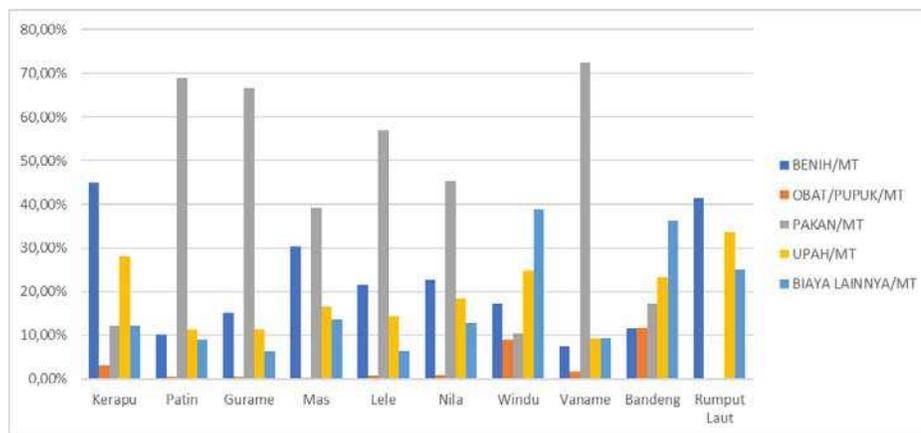
Realisasi				2024			% Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
3.544.245	4.327.158	4.842.187	4.912.815	4.800.000	5.130.000	106,88	8

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, harga ikan air tawar mengalami sedikit peningkatan terutama jenis jenis ikan air tawar karena ketersediaannya yang berkurang dipasar seiring dengan berkurangnya kapasitas produksi di sentra sentra produksi ikan air tawar seperti di waduk jatiluhur, danau toba dan danau maninjau, sebaliknya meningkatnya produksi rumput laut menyebabkan penurunan harga rumput laut.

Secara garis besar biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 40 % kecuali untuk ikan kerapu, mas, bandeng dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena kebanyakan pembudidaya kerapu membesarkan bibit hasil tangkapan alam sehingga tidak memerlukan pakan secara full (hanya penggemukan), sedangkan untuk ikan gurame walaupun mengandalkan pakan alami yang kebanyakan hanya diambil dari alam tetapi dalam struktur ongkos tetap harus di perhitungkan

sebagai biaya sehingga biaya pakan gurami menjadi lebih dari 60% sementara itu udang windu yang kebanyakan dibudidayakan dengan teknologi sederhana (tanpa pemberian pakan) sehingga biaya pakannya masih yang paling rendah dibandingkan ikan-ikan lainnya.



Gambar 9. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama

Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.

SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat

IKU. 3 Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
23,50	24,34	29,31	43,24	49,98	117,04	234,10	60,55

*Satuan milyar rupiah

Realisasi PNBP yang berasal dari DJPB s.d. 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi PNBP Ditjen Perikanan Budi Daya s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp117.014.598.359,- atau sebesar 234,10% atas target PNBP sebesar Rp.49.985.496.000,- berasal dari pendapatan PNBP lainnya berupa hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan; pemeriksaan/pengujian laboratorium; pekerjaan dan informasi; hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya; penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 di Balai-Balai budidaya lingkup DJPB, PNBP pengelolaan BMN dan pendapatan non anggaran. Kenaikan terhadap

- capaian tersebut diperoleh dari Hasil Kerja Sama Pengiriman Benih Bening Lobster dengan Koperasi dan Perusahaan di BLU BPBAP Situbondo
2. Ditjen Perikanan Budi Daya memproyeksikan PNPB bulan Desember sebesar Rp 7.759.192.343,- sedangkan realisasi PNPB bulan Desember sebesar Rp37.427.708.613,- sehingga terjadi deviasi 100% hal ini disebabkan peningkatan pendapatan BLU yang berasal dari peningkatan pelayanan atas Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha , Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, di bidang budi daya .
 3. PNPB lainnya berupa jenis PNPB pelayanan s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp 17.860.229.853,- didominasi dari Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) sebesar Rp 13.412.266.129,-.
 4. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (425289) sebesar Rp 3.706.286.800,- berupa pelayanan Laboratorium.
 5. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp 707.176.924,- berupa sewa asrama/mess, ruang rapat dan pertemuan di beberapa UPT seperti BBPBAP Jepara, BPBAP Takalar, LP2IL Serang, BPBAP Ujung Batee, BPBAT Tatelu, BBPAT Sukabumi, BPIU2K Karang Asem dan BLUPPB Karawang, BPPAP Situbondo.
 6. PNPB lainnya berupa pengelolaan BMN s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.823.903.294,- atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) berupa sewa rumah dinas, tambak, sewa tanah dan bangunan untuk coldstorage dan pendapatan penjualan peralatan dan mesin (425122) berupa lelang kendaraan dan ATK.

IKU.4 Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
-	-	45.813	45.892	23.784	32.509	170,82	-7,25

*Iku Baru Tahun 2022

Indikator Tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan Budi Daya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada perikanan Budi Daya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Sektor perikanan Budi Daya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan Budi Daya sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan Budi Daya meliputi kegiatan Pengelolaan Budi Daya Ikan

air Tawar, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut dan Pengelolaan Rumput Laut.

Adapun perhitungan Indikator ini dengan formula tenaga kerja yang terlibat adalah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dengan Realisasi tenaga kerja di tahun 2024 sebesar 32.509 orang dari target 23.784 orang atau mencapai 170,82% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Tenaga Kerja Terlibat Bidang Perikanan Budidaya

No	Bidang	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1.	Budi Daya Air Tawar	1.816	Tenaga kerja dihitung dari tenaga kerja yang terserap baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan bantuan pemerintah
2.	Budi Daya Air Laut	178	
3.	Budi Daya Air Payau	8.714	
4.	Budi Daya Rumput Laut	21.801	
	Jumlah	35.509	

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2022 jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya mengalami penurunan, hal ini terjadi karena indikator ini bergantung pada jumlah Bantuan Pemerintah yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

IKU.5. Korporasi Pembudidaya Ikan yang Dikembangkan

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
-	-	-	10	15	15	100	12,50

*iku Baru tahun 2023

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan korporasi pembudidaya ikan adalah:

- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan menuju korporasi.
- b. Mendukung terjadinya perubahan perilaku pembudidaya ikan menjadi mandiri dalam kegiatan pembudidayaan ikan.
- c. Mendorong terjadinya peningkatan produktivitas komoditas perikanan yang dibudidayakan.
- d. Mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Target Korporasi Pembudidaya Ikan yang berkembang pada tahun 2024 adalah 15 kelembagaan dengan capaian sebanyak 15 kelembagaan, sehingga didapatkan capaian sebesar 100% dari target tahunan.

1. Koperasi Mina Sejahtera berlokasi di Kabupaten Binjai, Sumatera Utara.
2. Koperasi Generasi Mandiri berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Riau.
3. Koperasi Jaring Mas berlokasi di Kabupaten Kampar, Riau.
4. Koperasi Asosiasi dan Pengusaha Pembudidaya berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat.
5. Koperasi Mina Mulya Sari berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu.
6. Koperasi Sinar Laut Indah berlokasi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
7. Koperasi Amanat Petani Indonesia berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
8. Koperasi Jaya Barokah Bersama berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
9. Koperasi Pembudidaya Windu Mas berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
10. Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
11. Koperasi Central Lele berlokasi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
12. Koperasi Bandeng Sejahtera Manakku berlokasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
13. Koperasi Makkio Dale berlokasi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
14. Koperasi Usaha Bersama Sejati berlokasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
15. Koperasi Tani Beriuk Sadar berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dalam rangka pengembangan usaha korporasi pembudidaya ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkolaborasi dan bekerjasama dengan Kedeputian Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Biro Perencanaan, Setjen KKP, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen yang bersama-sama telah memberikan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola koperasi melalui penyampaian materi terkait majemen Koperasi, pengelolaan teknis budidaya, pengelolaan teknis pasca panen dan pemasaran. Selain itu yang tidak kalah penting adalah fasilitasi akses pembiayaan yang di dukung oleh LPMUKP, sebagai salah satu BLU di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang fokus dalam peningkatan kapasitas keuangan dan permodalan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Keberhasilan kegiatan Korporasi Pembudidaya Ikan merupakan hasil sinergitas dan kerja sama antar semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diperlukan komitmen kuat serta koordinasi optimal diantara para pemangku kepentingan. Keberhasilan Korporasi Pembudidaya Ikan akan lebih cepat dicapai apabila didukung oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Usaha Korporasi dipimpin oleh manajer profesional yang mengelola bisnis korporasi secara transparan dan demokratis sesuai dengan kaidah bisnis komersial.

- b. Mensyaratkan skala usaha tertentu yang optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat, potensi, pengembangan bisnis dan pemasaran, adaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta kemampuan teknis pengelolaan dalam satu manajemen.
- c. Pengembangan korporasi yang dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat.
- d. Kegiatan korporasi tetap bertumpu pada komoditas unggulan dan memperhatikan peluang pengembangan diversifikasi produk.
- e. Terdapat lembaga (pemerintah/non pemerintah) yang berkomitmen serta mampu berfungsi sebagai fasilitator.
- f. Peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan akses pasar

Diharapkan melalui program Korporasi Pembudidaya Ikan, Koperasi yang bergerak dibidang pembudidayaan ikan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaannya terutama dalam pengelolaan keuangan koperasi dan pengelolaan teknis budidaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan perikanan budidaya dari ketergantungan terhadap Bantuan Pemerintah menjadi usaha modern dan mandiri (Investasi dan Bisnis).

SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan

IKU 6. Percontohan Pengelolaan cluster kawasan budidaya berkelanjutan

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
7	10	30	50	50	50	100	77,38

Kegiatan percontohan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya berkelanjutan di calon kawasan Budi Daya perikanan pada tahun 2024 di targetkan 50 paket dengan realisasi 50 paket atau 100% dari target. Adapun rincian kawasan tersebut sebagai berikut:

1. Klaster tambak udang sebanyak 2 kawasan berlokasi di Kabupaten pangandaran Jawa Barat dan Kabupaten Langkat Sumatera Utara
2. Klaster kawasan tambak bandeng Sebanyak 7 kawasan berlokasi di : Kabupaten Tanggerang Banten 4 klaster, Kabupaten Gresik Jawa Timur 1 klaster, Kabupaten Karawang Jawa Barat 1 klaster, dan Kabupaten Pangkejene Kepulauan 1 klaster
3. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) 14 kawasan berlokasi di Cirebon (1 paket) , Demak (1 paket) , lamongan (1 paket) , Tanggerang (1 paket) , Pekalongan (1 paket) , Maros (1 paket), Lampung selatan (1 paket) , Bekasi (1 paket) , Kendal (1 paket) , Gresik (1paket) , subang (2 paket) , Banyuwangi (2 paket),

4. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat (Rumput Laut) 1 kawasan di Maluku Tenggara Maluku dan 1 kawasan di Rote Ndao NTT
5. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan kepiting (1 kawasan di pasuruan)
6. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan Nila Salin (8 kawasan di Karawang)
7. Klaster komodita unggulan berbasis kawasan (lobster) 1 kawasan di Batam
8. Usaha pembudidaya ikan yang dibina dan dikembangkan 15 kawasan di : Kota Binjai Sumatera Utara (ikan lele), Kota Padang Sumatera Barat (ikan lele), Kabupaten Bengkalis Riau, Kabupaten Kampar Riau (Udang Vanamei), Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu (Ikan Nila), Kabupaten Lampung Timur Lampung (udang vanamei), Kabupaten Purwakarta Jawa Barat (Ikan Lele), Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (ikan Nila), Kabupaten Pati Jawa Tengah (bandeng dan Udang Vanamei), Kabupaten Gunung Kidul DI. Yogyakarta (ikan Lele), Kabupaten Situbondo Jawa Timur (ikan lele) , Kabupaten Lombok Tengah NTB (Ikan Nila), Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (rumput laut), Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan (Ikan Bandeng), Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Ikan Bandeng).

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp121.442.329.000,- dengan realisasi sebesar Rp120.313.475.347,- atau 99,07%.

SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya

IKU 7. Produksi Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi**	% capaian	
14,84	14,64	14,77	16,79	24,85	17,18	69,13	2,65

*juta ton

**angka sangat sementara

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar 17,18 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yakni sebesar 24,85 juta ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 69,14 persen. Produksi perikanan budidaya tahun 2024 naik jika dibandingkan dengan caaian produksi tahun 2023 sebesar 14,83 %

Jika dilihat selama periode 2020-2024, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata per tahunnya naik sebesar 2,65% persen.

Tabel 7. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2020-2024

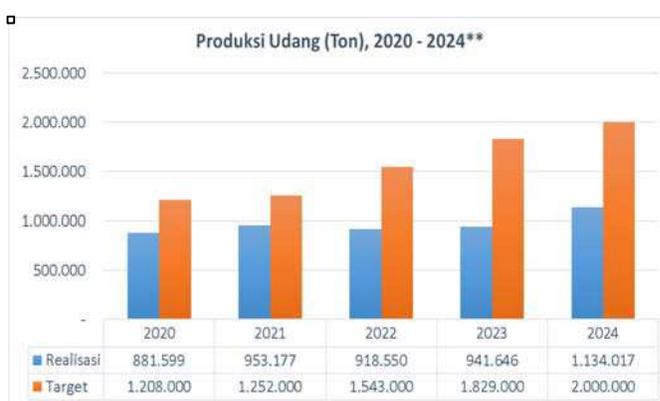
KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024	KENAIKAN (%)
Nila	1.172.633	1.300.529	1.356.654	1.368.542	1.380.359	1,19
Mas	560.669	651.238	508.724	483.365	571.782	0,42
Gurami	152.669	149.170	159.572	153.939	196.675	1,82
Patin	327.146	332.023	340.444	348.379	443.082	3,92

KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024	KENAIKAN (%)
Kakap	5.418	8.464	8.642	7.746	8.765	7,22
Rumput Laut	9.618.421	9.092.031	9.234.268	9.753.410	10.808.845	2,18
Lele	993.768	1.041.422	1.101.625	1.136.619	1.171.367	1,61
Kerapu	9.478	13.422	12.240	11.352	15.353	5,87
Bandeng	811.883	780.763	779.706	772.709	886.500	1,67
Udang	881.599	953.177	918.550	941.646	1.134.017	5,91
Lainnya	311.331	326.070	355.632	383.717	565.267	11,94
TOTAL	14.845.015	14.648.310	14.776.057	15.361.425	17.182.010	2,32

Sumber data Pusdatin

**angka sangat sementara

UDANG



Gambar 10. Produksi udang 2020-2024

Perkembangan produksi udang nasional tahun 2020 - 2024 mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,91% per tahunnya. Pada tahun 2024 produksi udang mencapai target sebesar 56,67%, tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan lahan untuk budidaya udang terkait dengan tata ruang yang masih

tumpang tindih dan masih ada efek berkurangnya pasar ekspor udang Indonesia

karena ada penolakan komoditas ekspor udang di pasar USA, akan tetapi produksi masih tetap meningkat dibandingkan tahun 2022 seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB). Ditjen perikanan budidaya telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang adalah (i) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (ii) Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iii) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan stakeholders lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (iv) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster; (v) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vi) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (vii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budidaya udang.

KERAPU



Gambar 11. Produksi Kerapu 2020-202

perikanan tangkapp sebagai konsekuensi mulai berlakunya Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Untuk lebih memacu peningkatan produksi kerapu ini berbagai upaya telah dilakukan oleh DJPB antara lain (i) Penyediaan benih ikan kerapu yang bermutu di UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga (HSRT); dan (ii) Adanya kebijakan program bantuan KJA budidaya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budidaya kerapu di beberapa daerah potensial.

KAKAP



Gambar 12. Produksi Kakap 2020-2024

Ketidaktercapaian target produksi ini karena penambahan target produksi dari PIT sehingga target kakap jauh diatas target sebelumnya selain itu ketersediaan benih ikan kakap yang terbatas juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap DJPB telah mengalokasikan

Trend produksi ikan kerapu dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini bisa dilihat dari trend produksinya yang cenderung naik dari tahun 2020. Produksi ikan kerapu pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2022 mencapai 15.353 ton atau tercapai targetnya sebesar 24,34 % dari target sebesar 63.052 ton. Tidak tercapainya target produksi ditahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan target produksi ikan dari

Capaian produksi ikan kakap dari tahun 2019 - 2023 sedikit mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 7,22% per tahun. Kakap merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang cukup digemari sebagai ikan konsumsi sehingga dengan sedikitnya produksi menyebabkan harga ikan kakap cenderung naik. Capaian produksi ikan kakap pada tahun 2023 mencapai 12,39% dari produksi yang ditargetkan.

bantuan berupa KJA laut dan pengembangan benih kakap di beberapa UPT pusat untuk mendukung budidaya kakap di KJA laut.

BANDENG



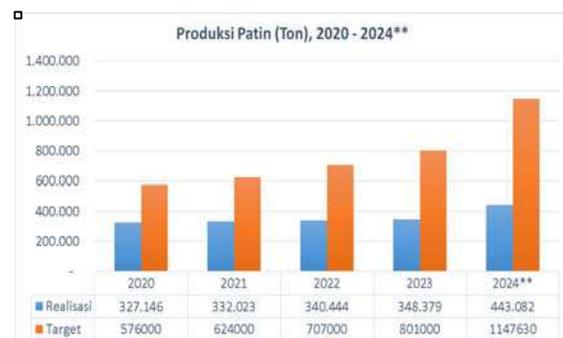
Gambar 13. Produksi Bandeng 2020-2024

Perkembangan produksi bandeng dari tahun 2020 - 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,67%. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 s.d 2022 karena pandemic dan meningkat kembali pada tahun 2023. Namun Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 target produksi bandeng tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya sentra produksi benih bandeng walaupun berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat masyarakat akan produk bandeng tetap tinggi. Indikasi masih adanya ekspor nener juga menyebabkan ketersediaan nener dalam negeri semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan.

Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan Ditjen perikanan budidaya dengan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha budidaya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan broodstock bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2020-2024 akan mampu tercapai.

PATIN

Produksi ikan patin dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,92%. Volume produksi pada kurun waktu tersebut masih belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam renstra dengan capaian pada tahun 2024 terhadap target sebesar 38,6%. Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2023



Gambar 14. Produksi Patin 2020-2024

antara lain disebabkan karena masih sulitnya memasarkan ikan patin mengingat ikan patin merupakan ikan yang masih belum bisa diterima oleh semua etnik di Indonesia, ikan patin terutama banyak disukai di daerah Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan sementara itu di pulau Jawa yang merupakan potensi untuk pemasaran penduduknya masih kurang menyukai ikan patin. Disisi lain permasalahan tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan tidak sebanding dengan harga yang berlaku di pasaran, sehingga secara ekonomis tingkat efisiensi masih cukup rendah. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan budidaya ikan patin melalui kerjasama sinergi, baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain, untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut diarahkan dalam rangka : (i) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti pada negara-negara yang banyak tenaga kerja indonesianya seperti arab Saudi dan daerah timur tengah lainnya; (ii) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien; (iii) Pengembangan kawasan budidaya ikan patin secara terintegrasi, serta (iv) Peningkatan nilai tambah produk menjadi hal mutlak dan terus dilakukan yaitu melalui pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin. Melalui upaya diatas, maka secara langsung akan mampu memberikan jaminan terhadap jalannya siklus bisnis yang positif dan berkesinambungan; (v) Mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.

NILA

Produksi ikan nila dari tahun 2020 - 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata kenaikan 1,19%. Dilihat dari trend capaian produksi terhadap target tahunan menunjukkan bahwa angka produksi nila sampai dengan tahun 2024 belum dapat dicapai. Capaian pada tahun 2024 mencapai 56,05% dari target. Terjadinya peningkatan produksi ikan, menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target volume produksi pada kurun waktu tersebut, antara lain dikarenakan secara umum kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, juga adanya kegiatan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau juga turut mempengaruhi capaian produksi ikan nila.



Gambar 15. Produksi Nila 2020-2024

Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain melalui (i) Pengembangan gerakan minapadi, (ii) Pengembangan budidaya ikan nila melalui intensifikasi dengan Bioflok dan Running Water dan budidaya ikan nila berbasis Kawasan seperti di BLU Karawang; (iii) Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas; (iv)

Ekstensifikasi pada kawasan potensial melalui rencana pengembangan nilai salin di eks tambak udang pantura jawa; serta (v) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas.

IKAN MAS



Gambar 16. Produksi Ikan Mas 2020-2024

Produksi ikan mas selama tahun 2020 - 2024 mengalami penurunan sebesar 0,42% dan target produksi belum mencapai target. Belum tercapainya target produksi ikan mas terutama disebabkan merebaknya berbagai penyakit ikan yang menyebabkan tingkat produktifitas menurun, sebagai

contoh virus KHV yang masih belum bisa hilang 100% di sentra budidaya ikan mas di kabupaten Agam.

Pencapaian target produksi ikan mas pada beberapa tahun belakangan ini dan tahun-tahun ke depan mengalami tantangan dengan adanya kebijakan zero kja secara nyata telah memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan produksi ikan mas. Namun Ditjen perikanan budidaya tetap berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dan dalam upaya pencapaian target volume produksi tersebut, maka dilakukan upaya-upaya yang secara langsung mendorong peningkatan efisiensi produksi, diantaranya : (i) Intensifikasi melalui pengembangan teknologi baik budidaya maupun aspek nutrisi (pakan) yang berkualitas berbasis bahan baku lokal; (ii) Pengembangan kapasitas usaha dengan dukungan penguatan modal bagi usaha skala kecil melalui penguatan kemitraan usaha; (iii) Perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah; dan (iv) pengembangan budidaya ikan dikombinasikan dengan lahan padi atau minapadi

LELE



Gambar 17. Produksi Lele 2020-2024

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,61%. Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun di tahun 2021 produksi mulai meningkat mengingat pandemi sudah beralih status menjadi endemi dengan semakin banyak penduduk Indonesia yang mendapat dosis vaksin ketiga, ikan lele yang bisa dibudidayakan dengan

mudah ini memiliki satu kekuatan yaitu, untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan adanya hasil positif selama beberapa tahun terakhir, maka untuk mempertahankan pencapaian produksi lele

di tahun selanjutnya, beberapa kegiatan yang perlu diteruskan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan; (ii) Penggunaan teknologi budidaya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efisiensi pemanfaatan lahan; (iii) Efisiensi pakan melalui bantuan gerakan pakan mandiri; dan (iv) pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.

GURAME



Gambar 18. Produksi Gurame 2020-2024

Produksi gurame tahun 2020 - 2024 menunjukkan kinerja yang positif, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,82%. Angka capaian produksi tahun 2024 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 30,41%. Namun produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2024 ini. meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya yang masih cukup terbuka. Produksi gurame masih didominasi

pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena proses produksi budidaya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame yang disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya.

Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budidaya gurame.

RUMPUT LAUT

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan *share* sebesar 62,9% terhadap produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan trend yang



Gambar 19. Produksi Rumpu Laut 2020-2024

positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,18%. Kenaikan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai bangkit yang disebabkan kualitas bibit yang semakin baik sehingga tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, dan juga produksi bibit rumput laut kultur jaringan sudah menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia.

Selama 5 tahun terakhir akan tetapi rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada total produksi perikanan budidaya, beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari per siklus sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budidaya yang mudah. Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah yang masyarakat ekonominya digolongkan bawah. Keuntungan lainnya adalah modal kerja yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, caragenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus menerus melakukan upaya terobosan diantaranya adalah pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria spp* dan *Euchema cottonii*. Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Euchema spinosum* dan *Caulerpa sp*.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
- Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan broodstock center : i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname “Global Gen”, Ikan Batak “Tor Soro”, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi); ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL); iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul; serta iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan

- usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; (vi) Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di Kab/Kota Minapolitan/Industrialisasi; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet ;
 - Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan;
 - Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah (i) Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu); (ii) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan (NRMP)* yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan (iii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan;
 - Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Rencana aksi Kedepan untuk lebih meningkatkan produksi perikanan budi daya antara lain :

1. Peningkatan fasilitas unit pembenihan di daerah melalui rehabilitasi sarana dan prasarana UPT baik pusat melalui dana APBN maupun UPTD melalui dana DAK.
2. Untuk mengantisipasi tiingginya harga pakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tetap melaksanakan kegiatan gerakan pakan mandiri dan juga melakukan trobosan untuk penyediaan pakan alternative.
3. Tetap melanjutkan program bantuan pemerintah untuk peningkatan produksi.
4. Pemantauan secara continue untuk penanggulangan hama penyakit ikan.

IKU 9. Produksi Ikan Hias

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
1,49	1,606	1,477	1,51	1,73	1,45	83,82	0,66

Ikan hias merupakan komoditas perikanan budi daya yang memiliki nilai tambah yang cukup besar dan peluang usaha yang menjanjikan menurut BPS hasil Sensus Pertanian 2023 Ikan Hias masih merupakan komoditas yang menyumbang pendapatan cukup besar diantara komoditas budidaya lainnya, ikan hias secara garis besar dibagi dalam dua kelompok utama yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut, komoditas ikan hias air tawar merupakan komoditas yang paling umum dibudi dayakan di masyarakat, ikan hias air tawar relative mudah untuk dibudidayakan,

untuk membudidayakan ikan hias air tawar tidak membutuhkan modal yang besar sebagai contoh media budidaya ikan hias air tawar dapat menggunakan barang barang bekas seperti mesin cuci bekas, kulkas bekas, rice cooker bekas dan masih banyak lagi bahan yang lainnya yang dapat dipergunakan, selain itu tempay yang dibutuhkan untuk membudi dayakan ikan hias air tawar tidak membutuhkan tempat yang luas

Realisasi volume produksi ikan hias Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,45 atau mencapai 88,12 % dari target sebesar 1,73 miliar ekor. Produksi ikan hias pada tahun 2024 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya peningkatan ini sediki banyak dipengaruhi oleh semakin diminatnya ikan hias asli Indonesia di pasar dunia, seperti arwana yang mulai merambah pasar dunia selain pasar asia, arwana juga sudah mulai memasuki pasar Amerika dan Eropa, seiring dengan peningkatan produksi ikan hias nilai ekspor ikan hias indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan terbukti dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam negara pengeksport ikan hias di duinia menjadi peringkat 2 terbesar (data *trademap* 2023), disamping itu semakin membaiknya kondisi pandemi covid-19 juga memberikan pengaruh yang cukup baik bagi perkembangan budidaya ikan hias, dukungan terhadap budidaya ikan hias diwujudkan oleh DJPB dengan menetapkan beberapa kampung ikan hias diantaranya Bogor, Karawang, Blitar dan Kediri, dengan ditetapkannya kabupaten-kabupaten tersebut sebagai kampung ikan hias dengan berbagai komoditas ikan hias yang menjadi unggulan seperti Kabupaten Blitar dengan budidaya koi dan mas koki, kediri budidaya cupang, dengan adanya kampung ikan hias ini diharapkan dapat lebih menggairahkan pembudidaya ikan hias dalam berinovasi mengembangkan jenis-jenis ikan hias dengan strain yang baru dan bukan merupakan jenis ikan yang invasif yang sudah jelas pelarangannya, diharapkan juga pembudidaya ikan hias mampu mengembangkan ikan hias endemik lokal yang cukup eksotis dan cukup banyak peminatnya di pasar luar negeri terutama USA dan Eropa.

Tabel 8. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2024 ** (1000 ekor)

KOMODITAS	REALISASI
TOTAL	1.524481
Koi	472.241
Mas Koki	80 .789
Cupang	211 .733
Plati	49 .767
Kuda Laut	6
Manfis	41 .111
Botia	16 .316
Discuss	8 .386
Oskar	18. 278
Gapi	50.161
Banggai CardinalFish	38
Moly	65.835
Nemo	229

KOMODITAS	REALISASI
Corydoras	10.851
Arwana	11.601
Blue Devil/Betok Ambon	33
Lainnya	487.105

Keterangan: **) angka sangat sementara

Rencana aksi kedepan untuk meningkatkan produksi ikan hias antara lain pemberian bantuan calin induk atau benih ikan hias kepada pembudidaya ikan hias.

SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya ini merupakan sasaran baru menggantikan sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan Budi Daya yang partisipatif. SS ini diganti untuk perbaikan dari hasil temuan atas evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya yang di evaluasi KeMenPan tahun 2021.

IKU 9. Prosentase Jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu)

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
99,66	99,80	99,89	100	97	100	103,09	0,09

Pada tahun 2024, jumlah sampel monitoring residu yang ditetapkan dalam dokumen rencana monitoring residu nasional (RMRN) 2024 sebanyak 4,000 sampel yang dilaksanakan di 26 Provinsi. Ruang lingkup kegiatan monitoring residu mencakup pengambilan sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel dan pengujian sampel guna memastikan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan telah memenuhi persyaratan global. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019 tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi. Monitoring residu dilaksanakan berdasarkan RMRN memuat perencanaan monitoring residu untuk periode 1 (satu) tahun, diantaranya: target lokasi, jenis komoditas, jumlah sampel, substansi uji, dan laboratorium Acuan & Pengujian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Lokasi yang menjadi obyek monitoring residu merupakan provinsi yang mempunyai kontribusi besar terhadap produksi perikanan budidaya nasional. Dalam hal ini, Provinsi sebagai pelaksana monitoring residu pada tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Provinsi, yang meliputi: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Target Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (Sampel Bebas Residu) (%) Tahun 2024 sebesar 97% dengan pengukuran capaian terhadap Indikator kinerja tersebut dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan monitoring residu dilakukan terhadap 5 (lima) komoditas perikanan budidaya yaitu udang, nila, bandeng, lele dan patin terhadap substansi yang menjadi ketentuan negara mitra. Pada tahun 2024, pengambilan sampel monitoring residu baru dilakukan pada Triwulan III. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Residu yang sebelumnya melalui Dana Dekonsentrasi kemudian menjadi Tugas Peantuan. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut membutuhkan tahapan yang harus dilalui oleh Satker Tugas Peantuan di Dinas Provinsi agar anggaran dapat dimanfaatkan, antara lain : Penetapan PPK, mengangkat bendahara, hingga mengajukan pembukaan rekening Virtual Account ke KPPN yang selanjutnya dilaporkan pada aplikasi SPRINT. Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong capaian sampel monitoring residu yaitu dengan memantau dan mengkoordinasikan secara intensif upaya yang harus dilakukan Satker Dinas KP di 26 Provinsi dalam kaitannya dengan tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran Tugas Peantuan.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Tahun 2024

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Hasil Uji Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Non Compliance	Compliance	Prosentase Compliance (%)
1	Aceh	Udang	133	113	-	113	100
2	Sumatera Utara	Udang	118	122	-	122	100
		Nila	47	47	-	47	100
3	Sumatera Barat	Udang	20	20	-	20	100
		Nila	38	38	-	38	100
4	Riau	Udang	22	22	-	22	100
		Patin	55	55	-	55	100
5	Jambi	Patin	55	55	-	55	100
6	Bangka Belitung	Udang	59	59	-	59	100
7	Sumatera Selatan	Udang	109	109	-	109	100
		Patin	51	51	-	51	100
8	Bengkulu	Udang	42	42	-	42	100
9	Lampung	Udang	385	385	-	385	100
10	Banten	Udang	46	49	-	49	100
11	Jawa Barat	Udang	311	191	-	191	100
		Lele	94	153	-	153	100
		Nila	67	128	-	128	100
12	Jawa Tengah	Udang	125	125	-	125	100
		Nila	73	73	-	73	100
13	DI Yogyakarta	Udang	42	48	-	48	100
14	Jawa Timur	Udang	264	264	-	264	100

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Hasil Uji Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Non Compliance	Compliance	Prosentase Compliance (%)
		Bandeng	72	72	-	72	100
		Nila	73	96	-	96	100
		Lele	73	96	-	96	100
15	Bali	Udang	57	61	-	61	100
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	423	423	-	423	100
17	Kalimantan Barat	Udang	60	60	-	60	100
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	74	-	74	100
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	8	-	8	100
		Patin	34	34	-	34	100
20	Kalimantan Timur	Udang	95	104	-	104	100
21	Kalimantan Utara	Udang	76	83	-	83	100
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	322	-	322	100
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	114	-	114	100
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	121	-	121	100
		Bandeng	67	67	-	67	100
25	Sulawesi Barat	Udang	99	99	-	99	100
26	Gorontalo	Udang	85	92	-	92	100
			4.000	4.095	-	4.095	100

Capaian Indikator Kinerja “Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan” Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh sampel monitoring residu yang diuji menunjukkan 100% *Compliance* atau sebanyak 4.095 sampel ikan dinyatakan aman dari kandungan residu obat ikan, pestisida dan kontaminan. Dalam upaya mendukung pelaksanaan monitoring residu Tahun 2024, maka dilakukan beberapa hal berikut :

- a) Penyusunan *Annual report 2023* dan *National residu monitoring plan (NRMP) 2024* yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2024;
- b) Penyelesaian Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024;
- c) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024;
- d) Harmonisasi Peraturan perundangan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024 yang outputnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor

37/PERMEN-KP/2019 Tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi, 21 November 2024;

- e) Penyampaian surat alokasi sampel Triwulan III dan Triwulan IV serta surat hasil pelaksanaan monitoring residu Triwulan III dan Triwulan IV yang ditujukan baik ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung kegiatan monitoring residu melalui Satker Tugas Pembantuan di 26 Provinsi sebesar Rp 10.400.000.000 termasuk di dalamnya anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp 1.993.090.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan senilai Rp 8.466.910.000. Sementara, anggaran monitoring residu yang dialokasikan di Pusat dalam rangka verifikasi implementasi pengendalian residu Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 98,06 % atau Rp 119.169.900,00 dari pagu anggaran pasca revisi sebesar Rp 121.526.000,00.

SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

IKM 10. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
74,70	80,94	83,35	88,37	85	86,80	102,12	3,89

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN KKP dilakukan pengukuran secara semesteran dengan target Tahun 2024 sebesar 85 (kategori tinggi). Berdasarkan formula perhitungan yang telah ditetapkan, hasil penilaian IP ASN KKP Tahun 2024 sebesar 88,44 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,23, Kompetensi 36,53, Kinerja 25,70, dan Disiplin 4,94.

Hasil tersebut berdasarkan pengukuran 4 (empat) aspek yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan *closing* data dari database kepegawaian SIMPEG dan SIASN tanggal 8 Januari 2025. Detail Capaian IP ASN di KKP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi IP ASN KKP Tahun 2024 berdasarkan Unit Organisasi Eselon I

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	21,85	33,06	27,14	5	87,05
2	Ditjen Kelautan Ruang Laut	21,22	37,95	26,69	5	90,86

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
3	Ditjen Perikanan Tangkap	21	36,53	26,57	5	89,10
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	21,03	35,17	25,60	5	86,80
5	Ditjen PDS	21,76	37,28	25,06	5	89,12
6	Ditjen PSDKP	21,11	35,84	25,31	5	87,25
7	Inspektorat Jenderal	21,21	39,49	25,12	5	90,82
8	BPPSDMKP	20,90	35,77	24,69	4,87	86,23
9	BPPMHKP	20,95	37,67	25,16	4,99	88,77
	Total	21,23	36,53	25,7	4,98	88,44 (Tinggi)

Berdasarkan hasil pengukuran per Unit Organisasi Eselon I, nilai IP ASN tertinggi yaitu Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 90,86 dan terendah yaitu BPPSDMKP sebesar 86,23.

Rencana akasi kedepan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IP ASN antara lain :

1. Melakukan himbauan kepada seluruh unit kerja untuk melakukan peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin di masing-masing unit kerja.
2. Menghimbau pegawai untuk peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai melalui diklat .
3. Pemberian informasi secara intensif mengenai pemenuhan nilai per dimensi di setiap Unit Organisasi Eselon II agar data dapat segera termutakhirkan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
4. Koordinasi intensif dengan pengelola Indeks Profesionalitas ASN terkait informasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

IKM 11. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
7	8	11	13	14	15	107,14	21,34

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menunjuk satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berstatus WBK/WBBM, dengan persyaratan antara lain dianggap sebagai unit penting/strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik.

Proses penetapan predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP, kemudian Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan dengan

besaran persentase nilai komponen pengungkit 60% dan komponen hasil 40% sebagaimana lembar kerja evaluasi (LKE) zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Inspektorat V Itjen KKP selaku Tim Penilai Internal KKP untuk pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah melakukan penilaian kepada satker lingkup KKP yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK internal KKP tahun 2024. Penilaian oleh TPI KKP dilakukan pada bulan November 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. BLUPPB Karawang memperoleh nilai sebesar 84,17 dan mendapat rekomendasi untuk memperoleh predikat menuju WBK (BA Hasil Penilaian TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 Nomor B.444/ITJ.5/PL/450/XI/2024 Tanggal 4 November 2024);
2. BPBAT Tatelu memperoleh nilai sebesar 82,56 dan mendapat rekomendasi untuk memperoleh predikat menuju WBK (BA Hasil Penilaian TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 Nomor B.443/ITJ.5/PL/450/XI/2024 Tanggal 4 November 2024);
3. BPKIL Serang memperoleh nilai sebesar 88,03 dan mendapat rekomendasi untuk memperoleh predikat menuju WBK (BA Hasil Penilaian TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 Nomor B.443/ITJ.5/PL/450/XI/2024 Tanggal 4 November 2024); (BPKIL Serang sebelumnya telah memperoleh predikat menuju WBK TPI KKP pada tahun 2021 (nomenklatur pada saat itu masih LPPIL). Sehubungan dengan adanya penataan organisasi yaitu peningkatan status dari loka menjadi balai (LPPIL menjadi BPKIL) maka perlu dilakukan penilaian kembali sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang baru).

Dengan penetapan BPKIL Serang, BLUPPB Karawang dan BPBAT Tatelu menjadi unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2024 maka capaian untuk target IKU “Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” tahun 2024 adalah 15 (lima belas) unit kerja 107,14% dari target yang ditetapkan 14 unit kerja.

Lima belas unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang telah memperoleh predikat menuju WBK yaitu:

1. BBPBAT Sukabumi Predikat WBK TPN Tahun 2014;
2. BPBL Ambon Predikat WBK TPI KKP Tahun 2018;
3. BPBAT Mandiangin Predikat WBK TPI KKP Tahun 2018;
4. BPBL Batam Predikat WBK TPI KKP Tahun 2019;
5. BBPBL Lampung Predikat WBK TPI KKP Tahun 2020;
6. BPIU2K Karangasem Predikat WBK TPI KKP Tahun 2020;
7. BBPBAP Jepara Predikat WBK TPN Tahun 2021;
8. BPBL Lombok Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2022;
9. BPBAT Sungai Gelam Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2022;

10. BPBAP Situbondo Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2022;
11. BPBAP Ujung Batee Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2023;
12. BPBAP Takalar Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2023;
13. BPBAT Tatelu Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2024;
14. BLUPPB Karawang Predikat WBK dari TPI KKP Tahun 2024.
15. BPKIL Serang Predikat WBK TPI KKP Tahun 2024;

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka pencapaian indikator ini adalah meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK internal KKP dan Nasional untuk melakukan kegiatan dan mendokumentasikannya secara berkelanjutan dan terus melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (nilai), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 84,92 (nilai) dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp.226.914.165,- atau sebesar 99,65% dari pagu revisi anggaran sebesar Rp.227.700.000,-.

IKM 12. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 (%)

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
0,14	0,2	0,03	0,38	≤0,5	0,06	190	260,08

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2023 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2023 (audited) tidak melebihi 1%. Capaian IKU “Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI” lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari Jumlah nilai temuan BPK pada laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.

- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan hingga periode Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 0,060%.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP, capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal adalah 0.0904% dari target kurang dari 5% (≤ 0.5). Rekapitulasi tindak lanjut temuan keuangan Laporan Keuangan 2023 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersaji pada tabel berikut:

No.	Unit Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekjen	571,218,613	631,793,931,033	0.0904
2	DJPKRL	175,999,847	399,297,824,951	0.0441
3	DJPDSKP	1,118,316,959	1,119,216,743,475	0.0999
4	DJPT	568,110,399	842,679,861,445	0.0674
5	DJPB	647,733,195	1,087,136,906,277	0.0596
6	BPPSDMKP	1,832,712,563	1,342,845,268,762	0.1365
7	DJPSPDKP	998,491,792	339,604,537,406	0.2940
8	BPPMHKP	11,350,000	497,626,943,467	0.0023
9	Inspektorat Jenderal	23,878,250	75,393,908,501	0.0317
Jumlah		5,947,811,618	6,335,595,925,317	0.0939

Anggaran dalam rangka penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP sebesar Rp196.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp195.999.200 atau sebesar 99.99% untuk kegiatan perjalanan dinas.

IKM 13. Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022*	2023	Target	Realisasi	% capaian	
86,70	86,54	80,03	80,83	82	84,04	102,49	2,5

* adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021,

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

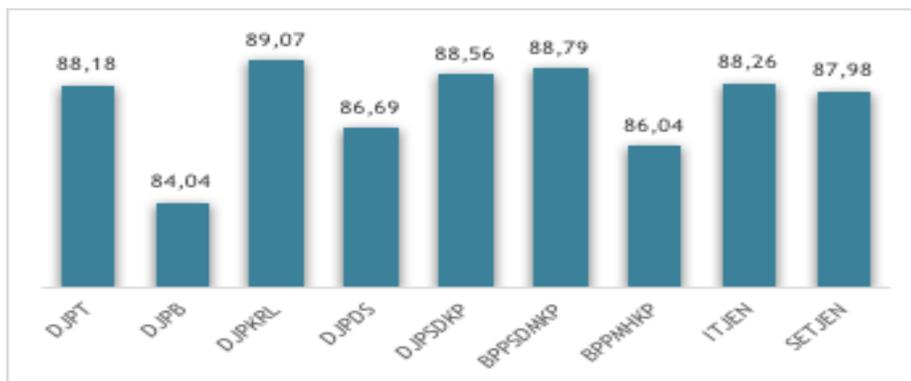
Tahun 2024 penilaian AKIP Ditjen Perikanan Budi Daya dilaksanakan pada bulan Juli 2024 oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui desk study dan penilaian lapangan dengan capaian 84,04 dari target 82 atau mencapai 102,49%. Capaian tersebut sesuai hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Selain itu, Selanjutnya disampaikan dilakukan juga evaluasi atas dokumen yang meliputi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

Terhadap catatan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 tersebut, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun mendatang, yaitu: peningkatan kualitas komponen SAKIP yang terus ditingkatkan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. aspek yang menjadi prioritas pada peningkatan aspek SAKIP ditahun 2024 adalah aspek pengukuran kinerja, dilakukan dengan melakukan verifikasi capaian kinerja setiap triwulan pada setiap entitas baik pusat maupun UPT Ditjen Perikanan Budi Daya di daerah pengukuran kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan indikator kinerja yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program dan kegiatan .

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain dengan menjalankan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan Nilai AKIP di Tahun 2024, antara lain :

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Ditjen Perikanan Budi Daya dalam pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;

4. Peningkatan kompetensi pengelola kinerja satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya melalui BIMTEK SAKIP bekerjasama dengan UGM di Provinsi Yogyakarta pada tanggal 23-27 September 2024
5. Perbandingan Nilai PM SAKIP ada unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 20. Grafik capaian Nilai PM SAKIP Lingkup KKP Tahun 2024

IKM 14. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Budi Daya

	Realisasi			2024			Kenaikan rata-rata 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		% capaian
4	3,87	3,81	3,6	3,3	3,3	3,57	108,18	-2,79

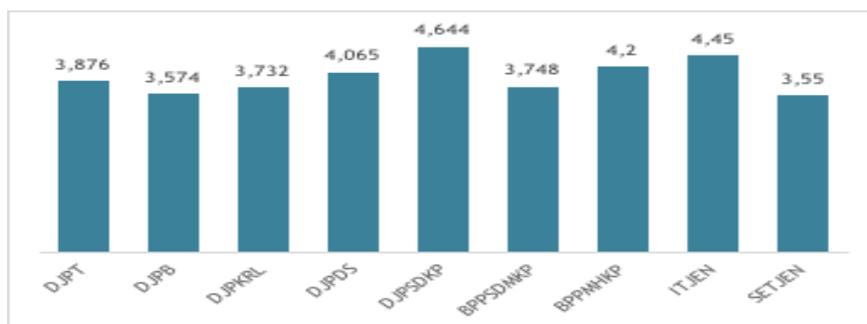
Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 secara umum telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,683 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,616 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,526 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3

Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya evaluasi berkala atas penerapan standar kompetensi dan SOP-SOP kepegawaian secara berkala, formal dan terdokumentasi. Kurangnya evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan

pembinaan SDM. Juga kurangnya evaluasi atas pengamanan umum dan pengendalian TI secara berkala dan juga kurangnya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemisahan tugas secara berkala, formal dan terdokumentasi.

Rencana aksi kedepan yaitu Penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh Tim Asesor KKP ini di harapkan bukan hanya untuk kebutuhan status, namun juga harus memastikan optimalnya kebermanfaatannya SPIP bagi peningkatan performa dan ketercapaian tujuan organisasi. Untuk itu rencana aksi yang harus dilakukan oleh DJPB adalah melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh Tim Asesor KKP.



Gambar 21. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Maturitas SPIP lingkup KKP

IKM 15. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)

Realisasi				2023			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
73,89	86,7	94,52	95,48	80	93,94	117,4%	6,44

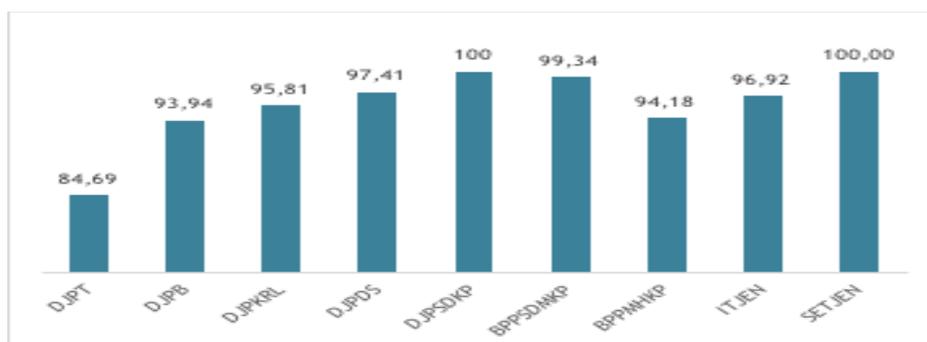
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Ditjen Perikanan Budi Daya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh unit eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (31 Desember 2024). LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024)

yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 93,94% (tuntas 790 dari 841 rekomendasi).

Perbandingan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 22. Perbandingan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023

IKM 16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
100	99,92	100	115,83	94	133,33	141,84	7,73

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi informasi platform Portal Collaboration Oêce dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat *web* <https://portal.kkp.go.id>. platform Portal Collaboration Oêce ini, pegawai KKP dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, video maupun penyebaran informasi dan *polling*.

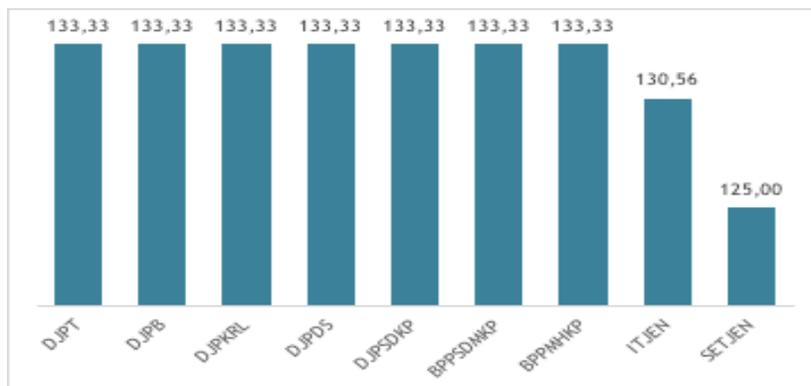
Portal dapat diakses melalui laman [https:// portal.kkp.go.id/](https://portal.kkp.go.id/) dengan Username: NIP/e- mail KKP dan Password: password e-mail KKP pada modul Pengetahuan. Portal Collaboration Oêce modul

pengetahuan merupakan merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP.

Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal Collaboration Oêce di laman <https://portal.kkp.go.id> dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perubahan Mekanisme Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2 dan Ketua Tim Kerja dengan Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4 point.

Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2023 berubah dari yang semula diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 10%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 70%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%) menjadi hanya keaktifan (100%). Hal ini sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor: 2659/SJ.7/TU.210/IX/2023 Tanggal 4 September 2023 tentang mplementasi Portal Collaboration Oêce Triwulan 3 Tahun 2023 dan Penyampaian Perubahan Manual IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP.

Perbandingan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 23. Perbandingan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023

IKM 17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024*			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
-	-	-	85,88	76	76,07	100,10	-2,86

*tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020-2022 karena nama ikunya adalah Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Pembinaan inovasi yang meliputi penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi diatur dalam PERMENPANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk: (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa: (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Target IKU “Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya” tahun 2024 adalah 76. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik lingkup KKP terhadap proposal inovasi pelayanan publik yang diusulkan oleh UPP lingkup KKP melalui Unit Eselon I masing-masing.

Capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah 76,07 atau 100,10% dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 oleh Tim Penilai Inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Agustus 2024 di Hotel Santika Batam Jl. Engku Putri No.9, Tlk. Tering, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Secara resmi hasil penilaian tersebut disampaikan oleh Plt. Kapusdatin Setjen KKP melalui Nota Dinas Nomor 3374/SJ.7/TU.210/IX/2024 Tanggal 5 September 2024 Tentang Penyampaian Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Hasil pleno penilaian proposal inovasi pelayanan publik lingkup KKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	DJPKRL	4 Proposal	76	84.26	110.87
2.	DJPT	6 Proposal	76	87.31	114.88
3.	DJPB	14 Proposal	76	76.07	100.10
4.	DJPDSPKP	5 Proposal	76	85.26	112.18
5.	DJPSDKP	8 Proposal	76	81.13	106.75
6.	BPPSDMKP	12 Proposal	76	80.24	105.57
7.	BPPSDM	12 Proposal	76	80.31	105.68
Total		61 Proposal	76	80.78	106.30

Empat belas proposal inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dinilai adalah sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Unit Kerja Pengusul
1.	Simpel Kontek 24 Jam	BBPBAP Jepara
2.	Form Diseminasi Budidaya Air tawar (Fordisbat)	BBPBAT Sukabumi
3.	Sistem Informasi Laboratorium Budidaya Air Tawar (SILUBAT)	BBPBAT Sukabumi
4.	Sistem Informasi Kinerja Pelayanan Berintegritas Inovatif No Gratifikasi (Sikepiting)	BPBAP Takalar
5.	Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul (Biru Lautku)	BPBAP Takalar
6.	Ultraviolet tambak (UVTA)	BPBAP Takalar
7.	Sistem Pelayanan Publik Terintegrasi (SIPPUTERI)	BPBAP Ujung Batee
8.	Sistem Pembenihan Ikan Tanpa Artemia (SIMITA)	BPBAT Mandiangin
9.	Patin Unggul Sakti Nusantara (PUSTINA)	BPBAT Sungai Gelam
10.	Sistem Informasi Pelayanan Robotik (Simapro)	BPBL Batam
11.	Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPATIN)	BLUPPB Karawang
12.	Sistem Integrasi Administrasi Pelayanan (SIGAP)	BPIUUK Karangasem
13.	SMART KIT	BPKIL Serang
14.	SIPAYANGKA	BPBAT Tatelu

Secara umum kendala yang ditemukan dalam upaya pencapaian IKU ini adalah proposal inovasi yang disusun oleh Unit Pelayanan Publik lingkup DJPB belum memuat informasi yang lengkap dan detail sesuai kriteria penilaian sehingga pada saat penilaian oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP memperoleh nilai yang tidak maksimal disebabkan karena Tim Penilai tidak dapat menangkap substansi dan manfaat inovasi dengan baik.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya (tahun 2025) adalah berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya terkait penyusunan proposal inovasi agar lebih informatif dan substantif.

Anggaran untuk mendukung IKU ini dibebankan pada unit yang mempunyai inovasi pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB.

IKM 18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata-rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
75,48	86,80	86,15	80,91	80	82,56	103,20	2,55

Sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan serta memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023, Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal

Perikanan Budi Daya Tahun 2023, dengan pelaksanaan uji petik di lapangan pada tanggal 28 Oktober s.d. 2 November 2024.

Uji petik dilakukan terhadap 6 (enam) jenis bantuan pemerintah yang diterima oleh 39 kelompok pada 11 kabupaten/kota penerima bantuan TA 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi:

1. **Pencapaian Tujuan (PT)**, yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan, berupa operasional dan kelengkapan bantuan, produksi dan pengelolaan bantuan secara berkelompok, dengan **bobot 80%**;
2. **Integrasi (IG)**, yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan **bobot 10%**; dan
3. **Adaptasi (AT)**, yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan **bobot 10%**.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023, mendapat nilai 82,56 dari target nilai 80 Sebagaimana surat Inspektorat 3 Itjen KKP Nomor T.1026/ITJ.3/HP.470/XI/2024 tentang Hasil Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup DJPB Tahun 2023 (<https://bit.ly/41dyjd6>). Capaian tersebut termasuk kategori Efektif (A), yaitu tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai, namun perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan. Rincian tingkat efektivitas diuraikan sebagai berikut:

Jenis Bantuan	JUmlah *		Skor			
	Total	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
Mesin Pakan Ikan	3	2	57,50	10,00	2,50	70,00
KJA	19	11	55,91	10,00	1,82	67,73
Kluster	6	6	80,00	10,00	6,67	96,67
Excavator	7	7	71,43	8,57	5,71	85,71
PITAP	4	4	80,00	8,75	7,50	96,25
Kincir	11	9	71,11	7,78	6,67	85,71
DJPB	50	39	68,46	9,10	5,00	82,56**

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Pemeriksaan Fisik dan Uji Substansi;

** Skor rata-rata jenis bantuan DJPB dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi.

IKM 19. Nilai IKPA DJPB

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
90,90	91,27	92,56	89,73	93,76	92,50	98,66	0,68

*ada perubahan perhitungan di Tahun 2022

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

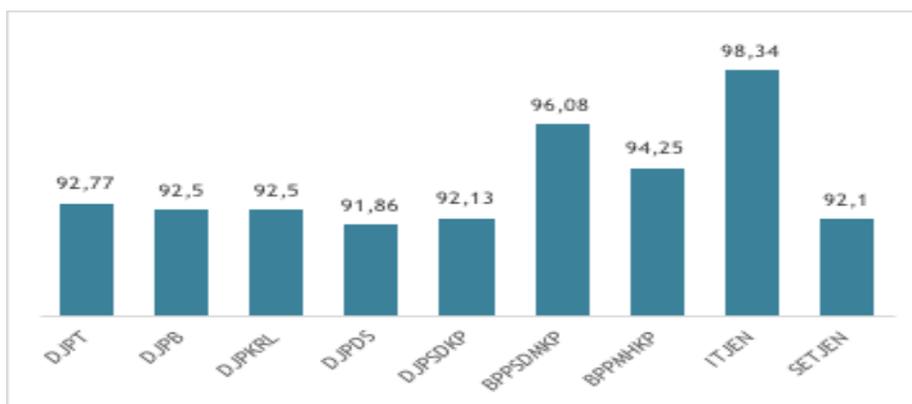
Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I /K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

Untuk Indikator Pelaksanaan Anggaran sendiri, terdapat beberapa komponen yang dijadikan indikator penilaian.

1. Indikator pertama adalah Kualitas Perencanaan Anggaran. Pada indikator ini, subkomponen yang dinilai adalah Revisi DIPA (berbobot 10) dan Deviasi Halaman III DIPA (berbobot 15). Di tahun 2024, nilai DJPB untuk Revisi DIPA adalah 99,60. Nilai tersebut sudah melampaui target. Adapun Satker yang belum mendapat nilai 100 pada subkomponen ini adalah (427706) BBPBL Lampung. Kemudian pada subkomponen Deviasi Halaman III DIPA, masih terjadi pola rencana penarikan anggaran dibagi rata 12 bulan dan belum menyesuaikan dengan KAK serta RAB yang disusun. Hal tersebut menyebabkan deviasi yang cukup tinggi. Deviasi Halaman III DIPA merupakan subkomponen dengan nilai terendah (66,38) dan yang menjadi penyebab utama nilai IKPA tidak mencapai target IKPA KKP.
2. Indikator selanjutnya adalah Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Empat subkomponen yang dinilai pada indikator ini adalah Penyerapan Anggaran (bobot 20), Belanja kontraktual (bobot 10), Penyelesaian Tagihan (bobot 10), serta Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10). Pada 2024, nilai pada keempat subkomponen tersebut secara berurutan adalah 95,50, 96,36, 99,73, serta 99,07. Dalam subkomponen Penyerapan Anggaran, DJPB dengan nilai 95,60 masih belum memenuhi target karena masih terdapat pagu blok senilai Rp223.024.494.000,00 yang tidak dapat digunakan, sehingga persentase penyerapannya menjadi tidak optimal.
3. Indikator terakhir adalah Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari 1 subkomponen berupa Capaian Output (bobot 25). Pada 2024, nilai Capaian Output DJPB adalah 98,94. Satker yang masih belum optimal dalam pengisian Capaian Output adalah

(019063) DKP Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 86, (319099) DKP Provinsi Gorontalo dengan nilai 53,33, serta (259108) DKP Provinsi Papua dengan nilai 44. Pada Desember 2024 terdapat perubahan peraturan penilaian Capaian Output serta pemutakhiran *load* data pada MONEV-PA Kementerian Keuangan. Sehingga beberapa RO yang memerlukan konfirmasi ke KPPN masing-masing wilayah, tidak ter-*update* nilainya dengan tepat waktu.

Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 24. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024

Kedepan untuk meningkatkan Nilai capaian IKPA maka perlu dilakukan :

1. Mengingatkan satker senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST sudah di tandatagani
2. tertib dan tepat melakukan pengukuran dan pengunggahan atas capaian output di masing-masing satuan kerja.
3. Mengingatkan satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
4. memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
5. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

IKM 20. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPB

Realisasi				2024			Kenaikan rata-rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
-	-	-	-	71	86,99	107,40	-

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Penilaian dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui laman MONEV Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id>).

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKPA Kementerian/Lembaga, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
	2. Nilai Efektivitas Unit Eselon I	20
	3. Nilai Efektivitas Satker	30
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Adapun formula penghitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai berikut:

$$NKPA_{K/L} = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NE_{UEI} \times WNE_{UEI}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA K/L : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

W_{CIKSS} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

WNE_{UEI} : Bobot Nilai Efektivitas Unit Eselon I

NE_{UEI} : Nilai Efektivitas Unit Eselon I

NE_{Satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker

Berdasarkan laman MONEV Kementerian Keuangan diperoleh NKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah 87,18 dari target 82,00, sementara Ditjen Perikanan Budi Daya mencapai 86,99

Tabel 11. Tabel Capaian NKPA Unit Eselon I Lingkup KKP

No.	Unit Eselon I	NKPA
1	Sekjen	88.72
2	Itjen	90.61
3	DJPT	84.12
4	DJPB	86.99
5	DJPSDKP	94.01
6	DJPDSKP	82.38
7	DJPKRL	97.90
8	BPSDMKP	95.28
9	BPPMHKP	82.83
NKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan		87.18

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Indikator Kinerja NKPA di tahun 2024, antara lain:

1. Perubahan target yang ditetapkan pada di tahun 2024 diturunkan menjadi 82 yang semula adalah 86 penyebabnya adalah adanya migrasi sistem menggunakan laman MONEV Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id>) akibatnya perkembangan data saat ini berubah dan dihitung otomatis oleh sistem dari Kementerian Keuangan.
2. Sebagian besar Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memahami cara perhitungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 dengan mekanisme yang baru, yaitu berdasarkan variabel indikator Efektivitas dan Efisiensi. Hal ini berdasarkan uji petik yang sudah dilakukan ke beberapa Satker lingkup DJPT, DJPB, DJPSDKP, dan BPPSDMKP. Akibatnya perkembangan capaian nilai NKPA tidak dapat naik secara signifikan.
3. Kementerian Keuangan memberikan perpanjangan waktu dalam pengisian data dukung NKPA menjadi tanggal 15 Januari 2025 yang semula sebelum tanggal 10 Januari 2025 dapat didapatkan capaian angka NKPA.

IKM 21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata-rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
-	55,26	76,06	82,28	80	82,24	102,8	11,44

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Setditjen PB merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Target nilai yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah 80 (%). Pada periode triwulan IV ini capaian adalah sebesar 82,24 (%). Nilai tersebut **telah** memenuhi target yang ditetapkan pada TA 2024, yaitu sebesar 80%. Adapun rincian nilai disajikan sebagai berikut:

No	Subkomponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I	10	6,67
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	15,00
3	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022	15	15,00
Hasil Penilaian		100	82,24

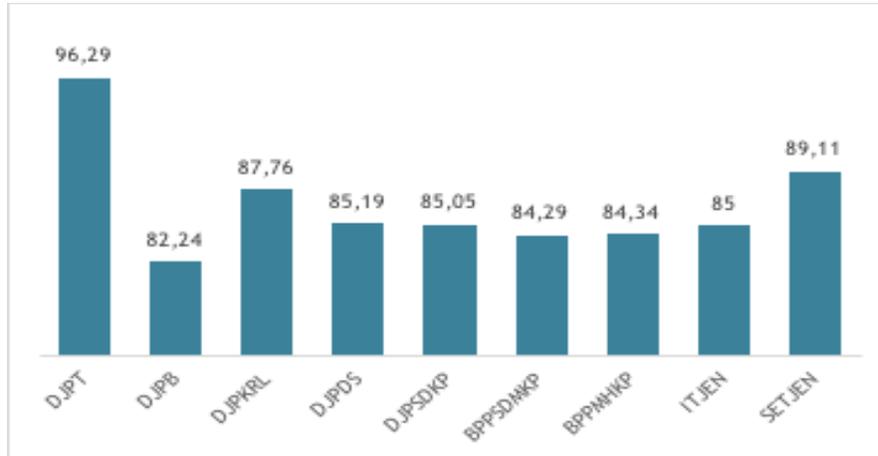
Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa ini, pada tahun 2024 Tim Kerja PBJ telah rutin melaksanakan pemantauan proses dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi SIRUP. Pemantauan tersebut dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ serta dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan PBJ diutamakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena mengefektifitaskan proses pengadaan serta meningkatkan akuntabilitas. Dalam hal ini untuk memasatkan hal tersebut, tim PBJ Sekretariat DJPB telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui SPSE baik pengadaan langsung melalui e-katalog maupun pengadaan secara tender.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, barang dan jasa hasil pengadaan harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 25 %. Untuk memastikan hal tersebut tim dari Pengelolaan BMN Sekretariat DJPB bersama dengan UKPBJ Biro Umum KKP rutin mengadakan pembahasan serta monitoring dan evaluasi mengenai TKDN. Monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai TKDN dan juga rekomendasi barang impor jika memang tidak ada barang lokal yang memenuhi syarat kandungan lokal. Kendala yang dihadapi adalah aplikasi pemantuan dari LKPP sering terjadi kendala dan tidak up to date, dan teknis pencatatan belum seluruhnya dipahami oleh satker serta masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

- i. Satker Eselon 1 melakukan pemantauan secara manual dan sedang dibuat aplikasi pemantauan oleh Biro umum dan PBJ
- ii. melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker TP Dinas Provinsi
- iii. Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan
- iv. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa



Gambar 25. Grafik Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Eseon i KKP

IKM 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
80	77,50	90	77,50	80	87,5	109,375	3

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ke pengguna barang (25%);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%);

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

Target nilai yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah 80 (%). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada periode akhir kegiatan.

Siklus Pengelolaan BMN dimulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pengamanan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pemindahtanganan sampai dengan penghapusan merupakan tahapan yang merupakan tanggungjawab tim Pengelolaan BMN DJPB.

Kegiatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dimulai dari 2 (dua) tahun sebelumnya tiap triwulan ke 3. Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) ini mencakup rencana kebutuhan pengadaan serta rencana pemeliharaan BMN, yang disusun sebagai panduan dalam penyusunan RKAKL.

Setelah pengadaan BMN selesai, BMN tersebut perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Proses PSP dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah barang dicatat dan mencakup proses inventarisasi Barang Milik Negara. Usulan PSP diolah oleh tim Pengelolaan BMN untuk selanjutnya diteruskan ke Pengguna barang atau ke Pengelola Barang untuk diterbitkan Surat Keputusan PSP Menteri Kelautan RI atau Menteri Keuangan RI.

Pemanfaatan BMN dapat dilaksanakan melalui Penggunaan sendiri maupun pihak lain. Proses penggunaan oleh pihak lain diverifikasi apakah penggunaan BMN tersebut tidak mengganggu tusi dan kegiatan penggunaan tersebut mendukung tusi DJPB.

BMN dapat digunakan sendiri oleh internal DJPB dengan menerbitkan surat pemakaian/penggunaan/peminjaman yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) satker.

BMN yang telah habis masa manfaatnya dapat dihapuskan, kegiatan ini dimulai dari inventarisasi, pembuatan usulan ke Pengguna Barang, persetujuan Pengelola Barang sampai lelang oleh KPKNL setempat.

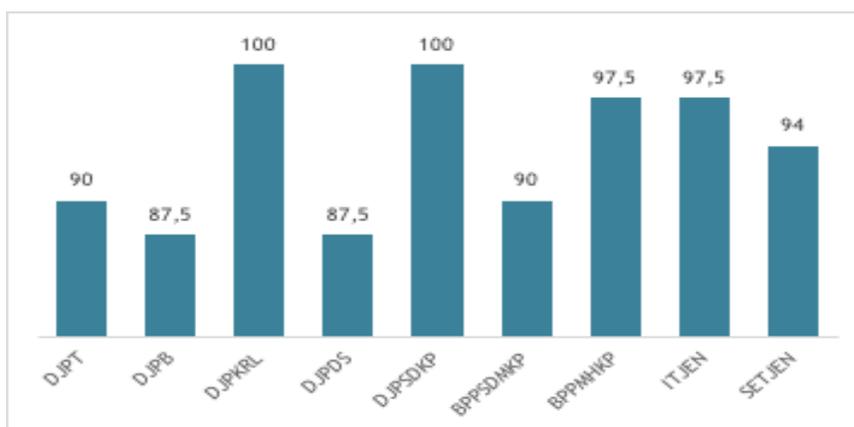
Segala proses pengelolaan BMN tersebut dicatat dan ditatausahakan melalui aplikasi SAKTI, yang tiap bulannya dilaksanakan rekonsiliasi serta penyusunan stok opname tiap semester. Hasil penginputan tersebut tiap akhir periode atau tiap semester, maupun Audited setelah dilakukan reviu oleh inspektorat jenderal, menghasilkan Laporan BMN dan Catatan atas Laporan BMN.

Tindaklanjut atas rencana aksi pada tahun 2024 yakni mendorong satker untuk melakukan sinkronisasi data pada aplikasi SIMANv2 dengan pengajuan seluruh kegiatan pengelolaan BMN pada aplikasi SIMANv2.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengelolaan BMN pada tahun berjalan serta pemahaman terkait penyusunan Laporan Barang Milik Negara (meliputi dokumen dukung, penginputan dan pendetailan)

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Mendorong Usulan hibah dan Penghapusan (penjualan, sebab lain, dan pemusnahan) atas BMN yang berada di satker Tugas Pembantuan serta aset Henti guna dan Rusak Berat yang berada di Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB
2. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan.
3. Pendampingan penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu dan akuntabel.
4. Melakukan Inventarisasi atas seluruh aset yang berada di satker lingkup DJPB, untuk BMN yang rusak berat akan dilakukan usulan penghapusan.
5. Membuat Berita Acara Pemakaian/peminjaman atas penggunaan BMN oleh pegawai.



Gambar 26. Perbandingan Tingkat Kepatuhan peneglolaan BMN Lingkup KKP

IKM 23. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data

Realisasi				2024			Kenaikan rata rata 2020-2024
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	
-	-	-	99,47	91	100	109,89	-

*iku baru tahun 2023

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian

dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)
2. Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%

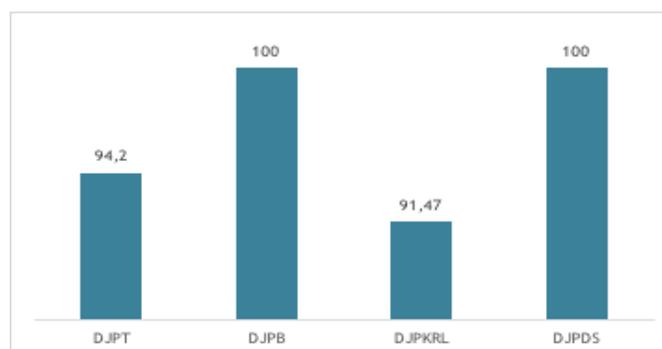
Capaian IKU *Mandatory* Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023 adalah 99,47% atau mencapai.. dari target 90. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ada di tahun 2023

REncana aksi kedepan untuk meingkatkan capaian indikator ini antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mensosialisasikan SOP dalam entry data KUSUKA melalui aplikasi satudata kepada enumerator DJPB terutama enumerator yang masih baru dan baru ditugaskan sebagai enumerator;
2. Berkoordinasi dengan validator dinas kabupaten kota agar segera melakukan validasi data terutama data KUSUKA blok khusus;
3. Berkoordinasi dengan Pusluh dan Penyuluh yang ditugaskan sebagai enumerator perikanan Budi Daya untuk melakukan percepatan entry data KUSUKA;
4. Berusaha untuk melakukan pembayaran BOP pengumpulan data KUSUKA secara tepat waktu.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Coverage lokasi pengumpulan data KUSUKA yang cukup luas;
2. Kondisi jaringan internet yang tidak merata di setiap daerah;
3. Tingkat pemahaman enumerator yang tidak sama;
4. Rasio antara enumerator dan jumlah responden yang belum memadai.



Gambar 27. Perbandingan capaian tingkat Kepatuhan Data Eselon I KKP

3.2. Efisiensi

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas video confrence, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, dan pengurangan biaya perjalanan dinas. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi Perikanan Budidaya namun tetap menjaga kualitas kinerja. Efisiensi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 ini mencapai 20,74%.

Tabel 12. Nilai Efisiensi Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

No	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	%NPSP x Anggaran Per Sasaran	% Efisiensi Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7=3x4	8=(7-5)	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya	102,05%	98,61%	757.696.657.000	590.307.736.607	77,91%	747.164.673.468	156.856.936.861
2	Ekonomi sektor perikanan Budi Daya	111,44%						
3	Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Berkelanjutan	100,00%						
4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	76,48%						
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	103,09%						
6	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	107,76%	107,76%	260.509.030.000	226.439.457.045	86,92%	280.724.530.728	54.285.073.683
Jumlah			1.018.205.687.000	816.747.193.652	80,21%	1.027.889.204.196	211.142.010.544	
							% Efisiensi (8/4)	20,74%

3.3. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2024 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.227.143.203.000,- Berdasarkan data dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan pagu efektif setelah blokir AA sebesar Rp1.004.234.704.000,-

sampai dengan triwulan IV tahun 2024, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp987.841.797.093,- (98,37% dari pagu efektif), menurun secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2023 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 0,44%, akan tetapi bila realisasi anggaran dilihat secara rata-rata sejak tahun 2020 hingga 2024 sebesar 94,77%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan IV tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan IV Tahun 2020 - 2024

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	Rata-rata Realisasi (%)
2024	1.004.234.704.000,-	987.841.797.093,-	98,37	94,77
2023	1.100.237.305.000,-	1.087.136.906.277,-	98,81	
2022	953.833.625.000,-	944.650.891.776,-	99,04	
2021	782.065.357.000,-	770.399.106.401,-	98,55	
2020	1.018.205.687.000,-	805.480.486.256,-	79,11	

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp186.783.785.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp720.634.092.000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp96.816.827.000,-.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2024

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	186.783.785.000	185.828.924.729	99,49	168.653.178.000	165.462.819.652	98,11
Barang	720.634.092.000	708.117.698.064	98,26	807.237.488.000	797.757.879.989	98,83
Modal	96.816.827.000	93.895.174.300	96,98	124.346.639.000	123.916.206.636	99,65
Total	1.004.234.704.000	987.841.797.093	98,37	1.100.237.305.000	1.087.136.906.277	98,81

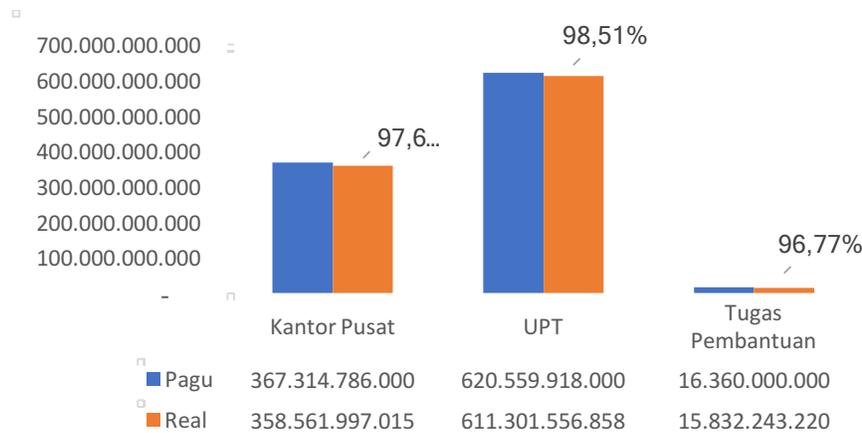
Sementa pagu dan realisasi anggaran Per Satuan kerja tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Satuan Kerja V Tahun 2023 dan 2024

SATUAN KERJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pusat	367.314.786.000	358.561.997.015	97,62	432.909.168.000	427.893.191.250	98,84
UPT	620.559.918.000	611.301.556.858	98,51	638.732.448.000	631.720.809.672	98,90
TP	16.360.000.000	15.832.243.220	96,77	28.595.689.000	27.522.905.355	96,25
Total	1.004.234.704.000	987.841.797.093	98,37	1.100.237.305.000	1.087.136.906.277	98,81

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2024 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang dan Belanja Pegawai, sedangkan

untuk Belanja Modal sangat rendah karena mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.



Gambar 28. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker UPT (98,51%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Tugas Pembantuan Provinsi (96,77%) sebagaimana berikut

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 97,62%, dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 98,51%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandiangin 98,56% dan terendah pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 96,76%

3. Satker Tugas Pembantuan Provinsi

Realisasi anggaran pada satker Tugas Pembantuan Provinsi keseluruhan sebesar 96,77%, dengan capaian terbesar terdapat pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Riau 99,98% dan terendah pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah 83,64%.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada periode tahun bersangkutan sekaligus capaian akhir periode renstra Tahun 2020-2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang diperjanjikan, sebagian besar telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, walaupun nilai pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan tercapai 100,14%. Data dukung capaian Kinerja DJPB terdapat pada tautan <https://bit.ly/4aZfrSo>.
3. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Terdapat indikator kinerja yang pengukurannya tidak dibawah kendali langsung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) dan Pertumbuhan PDB Perikanan , yang cukup berpengaruh besar terhadap nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2024 secara keseluruhan.
 - b. Tidak tercapainya target produksi ikan dan produksi ikan hias dikarenakan beberapa faktor diantaranya :
 - Sarana dan prasarana : Masih terbatasnya fasilitas pembenihan baik secara kualitas maupun secara kuantitas; Harga pakan yang masih cukup tinggi karena sebagian besar bahan baku masih impor, meskipun pemerintah telah melakukan program gerakan pakan mandiri tetapi masih belum mencukupi kebutuhan pakan nasional.
 - Kurangnya Fasilitas pengolahan mengakibatkan pembudidaya tidak dapat memaksimalkan produksinya. Fasilitas pengolahan ini cukup berperan karena sifat produk perikanan yang mudah rusak, sehingga diperlukan Teknik penanganan yang baik untuk menjaga kualitas dan nutrisi produk.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2024 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Terdapat indikator kinerja yang pengukurannya tidak dibawah kendali langsung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi), yang cukup berpengaruh besar terhadap nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2024 secara keseluruhan.	Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2025-2029 yang keseluruhannya dapat dikendalikan pencapaiannya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
2	<p>Tidak tercapainya target produksi ikan dan produksi ikan hias dikarenakan beberapa factor diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sarana dan prasarana : Masih terbatasnya fasilitas pembenihan baik secara kualitas maupun secara kuantitas; Harga pakan yang masih cukup tinggi karena sebagian besar bahan baku masih impor, meskipun pemerintah telah melakukan program gerakan pakan mandiri tetapi masih belum mencukupi kebutuhan pakan nasional. ii. Hama penyakit ikan iii. Kurangnya Fasilitas pengolahan mengakibatkan pembudidaya tidak dapat memaksimalkan produksinya. Fasilitas pengolahan ini cukup berperan karena sifat produk perikanan yang mudah rusak, 	<ul style="list-style-type: none"> I. Peningkatan fasilitas unit pembenihan di daerah melalui rehabilitasi sarana dan prasarana UPT baik pusat melalui dana APBN maupun UPTD melalui dana DAK. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset untuk menghasilkan induk yang bermutu. II. Untuk mengantisipasi tiingginya harga pakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tetap melaksanakan kegiatan gerakan pakan mandiri dan juga melakukan trobosan untuk penyediaan pakan alternative, misalnya maggot. II. Pemantauan secara continue untuk penanggulangan hama penyakit ikan V. Ditjen Perikanan Budidaya melakuikan koordinasi dan bekerja sama dengan Ditjen PDS untuk penyediaan Sarana

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
	sehingga diperlukan Teknik penanganan yang baik untuk menjaga kualitas dan nutrisi produk.	pengolahan di sentra sentra produksi perikanan budidaya.

